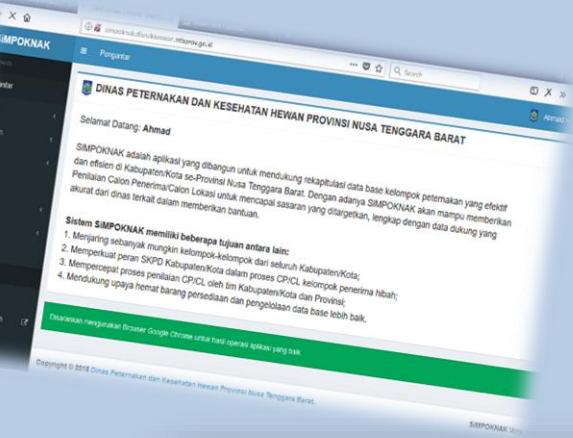


LAPORAN TAHUNAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2021



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Airlangga No. 56 Mataram Tlp. 0370-621862 Fax. 0370-622658 Mataram 83025

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sub sector peternakan dengan dua sasaran yang didicapai melalui Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu dengan meningkatnya ketersedian daging sapi dan telur serta meningkatnya pendapatan petani peternak (NTP Peternakan).

Disadari bahwa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada, Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai bahan evaluasi dan informasi yang sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dimasa mendatang.

Mataram,

2022

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Drh. Khairul Akbar, M.Si
NIP. 19670525 199703 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	2
GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	2
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
2.2. Sumber Daya.....	4
2.3. Kinerja Pelayanan	7
BAB III.....	8
ISU DAN PERMASALAHAN	8
BAB IV	9
PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	9
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah	9
4.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	9
4.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum	10
4.4. Rencana Kerja Serta Target Dan Pendanaannya	11
BAB V	15
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	15
5.1. Capaian Kinerja RPJMD.....	15
5.2. Capaian Kinerja Renstra	16
5.3. Capaian Kinerja Renja OPD	19
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	24
c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	31
d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	31
e. Program Penyuluhan Pertanian	39
5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan	41
5.5. Permasalahan Dan Kendala.....	42
5.6. Saran Dan Tindak Lanjut	44

BAB VI.....	46
PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM	46
BAB VII	47
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN	47
BAB VIII.....	49
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	49
8.1. Dasar Hukum Penyelengaraan Tugas Pembantuan	49
8.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	49
8.3. Capain Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	51
a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.....	53
b. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	59
c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	63
d. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.....	66
e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	68
f. Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	71
8.4. Permasalahan Dan Kendala.....	71
8.5. Sasaran Dan Tindak Lanjut	72
BAB IX.....	73
PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	4
Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	5
Tabel 2. 3 Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	5
Tabel 2. 4 Sarana Prasara Pendukung Pelayanan Pembangunan Bidang Peternakan	6
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2019-2021.....	7
Tabel 5. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	15
Tabel 5. 2 Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2021	16
Tabel 5. 3 Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2021	17
Tabel 5. 4 Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	20
Tabel 5. 5 Target dan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2021	25
Tabel 5. 6 Data Hasil Produksi Semen Beku Pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021	27
Tabel 5. 7 Realisasi pemeriksaan uji Post Thawing Motility (PTM) adalah sebagai berikut:....	29
Tabel 5. 8 Daftar Bantuan Ternak/ Srana dan Prasarana Peternakan/ Hibah Uang Tahun 2021	30
Tabel 5. 9 Rekapitulasi Jenis Kegiatan Dan Jumlah Kelompok Penerima Hibah Uang Tahun 2021.....	31
Tabel 5. 10 Data Situasi Penyakit Hewan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.	33
Tabel 5. 11 Unit Usaha yang telah memiliki NKV Tahun 2021	35
Tabel 5. 12 Data Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau dan Ternak Lainnya di Provinsi NTB Tahun 2021.....	38
Tabel 5. 13 Pagu dan Realisasi Capaian Kinerja Program Unggulan Tahun 2021	41
Tabel 7. 1 Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBH-CHT Tahun 2021 Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	47

Tabel 8. 1 Daftar Pagu Satker (239129) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	
Tahun Anggaran 2021	50
Tabel 8. 2 Pagu dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan	
Hewan Provinsi NTB Tahun 2021	52
Tabel 8. 3 Identifikasi potensi pengembangan sarang burung wallet di NTB	53
Tabel 8. 4 Data realisasi pengiriman ternak menggunakan angkutan khusus ternak Camara	
Nusantara.....	55
Tabel 8. 5 Data Pasar Hewan di Provinsi NTB Tahun 2021	59
Tabel 8. 6 Rekapan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian Mutu dan	
Sertifikasi Pakan – Bekasi Tahun 2021:.....	61
Tabel 8. 7 Hasil Uji Laboratorium terhadap pakan konsentrat sapi potong pabrikan yang diambil	
di Kelompok Tahun 2021.....	63
Tabel 8. 8 Target dan Realisasi Kegiatan Vaksinasi Rabies di NTB Tahun 2021	64
Tabel 8. 9 Target dan Realisasi Pemberian Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan....	65
Tabel 8. 10 Unit Usaha yang telah memiliki NKV Tahun 2021	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi sebagaimana Pasal 23 ayat 3 Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :	3
Gambar 2 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan di Provinsi NTB Tahun 2020-2021.....	19
Gambar 3 Populasi Ternak Tahun 2019-2021	24
Gambar 4 Grafik Perkembangan Harga Karkas Ayam Broiler	57
Gambar 5 Grafik Perkembangan Harga Daging Sapi Murni	57
Gambar 6 Grafik Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	58

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. RPJMD ini merupakan periode perencanaan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. RPJMD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah berlangsung hampir dua tahun, terjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, disertai munculnya wabah Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Visi Pemerintah Provinsi NTB periode 2019 - 2023 yaitu Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah daerah menetapkan 6 (enam) misi utama yang menjadi acuan untuk dipedomani dalam pembangunan di NTB selama 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya mengacu pada Misi 5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI, melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrialisasi.

Dalam mengimplementasikan capaian misi 5 yaitu NTB Sejahtera Mandiri, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilaksanakan melalui program strategis dan unggulan yaitu kampung unggas, industrialisasi pakan ternak dan beserta program strategis rutin lainnya

BAB II

GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 23 ayat 1 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Adapun ringkasan tugas adalah Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan.

Sedangkan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah :

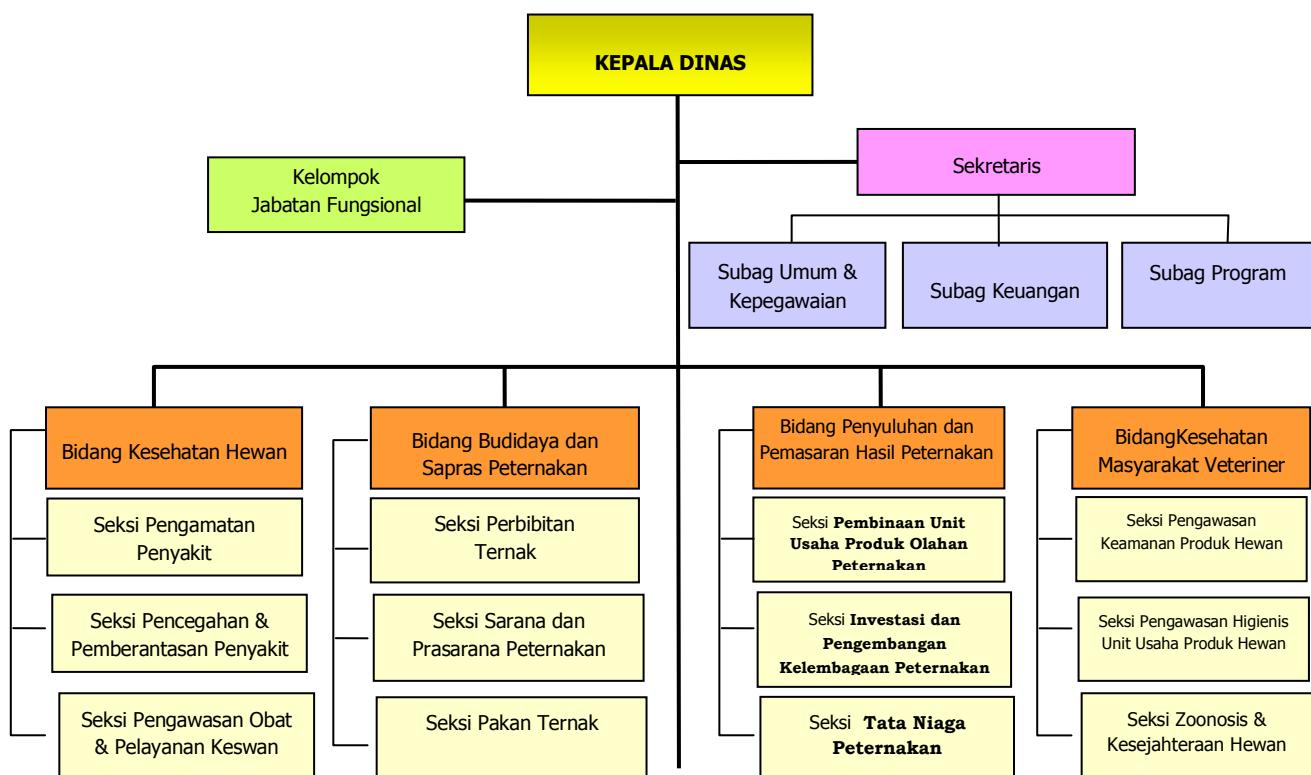
(1). Perumusan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (2) Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

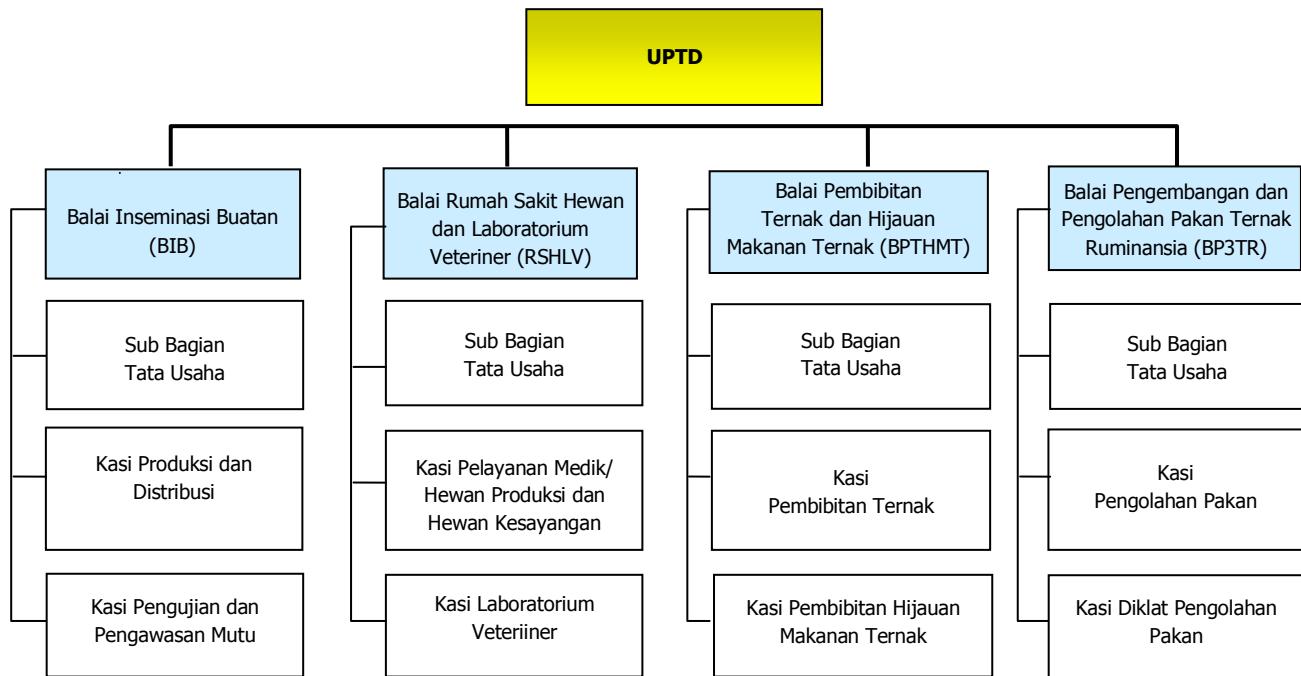
Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut : Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- d. Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pakan Ternak.
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan;
 - 2. Seksi Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Tata Niaga Peternakan;
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
 - 2. Seksi Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan; dan
 - 3. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi sebagaimana Pasal 23 ayat 3 Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :





2.2.Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB termasuk yang tersebar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB berjumlah 291 orang terdiri dari PNS 156 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2 orang, Tenaga kontrak 149 orang. Sedangkan tenaga teknis yang bertugas di lapangan di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang dibawah koordinasi dinas peternakan atau dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan pada masing-masing kabupaten/kota yaitu, terdiri atas Dokter Hewan 90 orang, Sarjana Peternakan 141 orang, Paramedis dan Penyuluhan Peternakan 277 orang dan Petugas Inseminator 400 orang.

Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	PNS	7	56	56	17	136
2.	P3K	-	-	2	-	2
	Jumlah	7	56	58	17	138

Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

No	Pendidikan	PNS	PTT	THL	Jumlah
1.	Doktor	-	-	-	-
2.	Strata 2	13	-	2	15
3.	Strata 1	54	-	60	114
4.	D1/D2/D3	2	-	11	13
5.	SLTA/SMA	46	-	61	107
6.	SLTP/SMP	10	-	4	14
7.	SD	13	2	11	26
Jumlah		138	2	149	289

Tabel 2. 3 Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
2.	Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
3.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
4	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	2	-	2
5	Medik Veteriner Ahli Muda Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	2	4	6
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	2	-	2

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
7	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
8	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
9	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan / Mahir Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	-	-	1	-	1
Jumlah		-	-	12	4	16

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Tabel 2. 4 Sarana Prasara Pendukung Pelayanan Pembangunan Bidang Peternakan

No.	Uraian	Lokasi		Jumlah (unit)
		P. Lombok	P. Sumbawa	
1.	Pusat Kesehatan Hewan	37	51	88
2.	Laboratorium Type B	1	0	1
3.	Laboratorium Type C	3	3	6
4.	Holding Ground	1	2	3
5.	Pasar Hewan	5	2	7
6.	UPT Inseminasi Buatan	1	0	1
7.	Pos Inseminasi Buatan	107	76	183
8.	Rumah Sakit Hewan	1	0	1
9.	Rumah Potong Hewan dan TPH	37	25	62
10.	Rumah Potong Hewan (Modern)	1	3	4
11.	Pembibitan Sapi Brangus	1	0	1
12.	Pembibitan HMT & Ternak	1	2	3
13.	UPT Pengolahan pakan	1	0	1

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

2.3.Kinerja Pelayanan

Hasil pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) tahun 2017-2021, dimulai dari Program NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS), kemudian dilanjutkan dengan Program Industrialisasi Peternakan dimana komoditi sapi menjadi komoditi strategis dalam menggerakkan perekonomian pedesaan melalui akselerasi beberapa indikator utama, yaitu perbanyak induk, meningkatkan kelahiran anak melalui intensifikasi kawin alam dan teknologi inseminasi, mengurangi kematian pedet, membatasi pengeluaran ternak bibit dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif.

Keragaan capaian kinerja dinas peternakan dan kesehatan hewan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2019-2021.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	
					TARGET	CAPAIAN
1	Populasi	Ekor	1.234.640	1.285.746	1.384.009	1.320.551
2	Induk Produktif	Ekor	555.588	578.586	622.804	597.345
		%	45	45	45	45
3	Kelahiran Pedet	Ekor	444.470	462.869	498.234	477.876
		%	80	80	80	80
4	Kematian Pedet	Ekor	44.447	46.287	49.824	47.787
		%	10	10	10	10
5	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	50	60	50	10
		%	0,54	1	1	0,19
6	Pengeluaran Bibit	Ekor	685	318	10.000	1.101
7	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	11.835	9.222	15.000	13.979
8	Serapan Tenaga Kerja	Orang	308.660	321.437	321.437	331.858
9	Kesejahteraan Masyarakat (NTP)	Point	130,98	107	110	108,61

*Data Sementara Tahun 2021

BAB III

ISU DAN PERMASALAHAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatan selalu berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya atau pada tahun berjalan. Seiring dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi turut berpengaruh terhadap lambatnya pencapaian tujuan diantaranya:

1. Ketersediaan sumberdaya yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi sangat terbatas.
2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak.
3. Masih tingginya kejadian kasus penyakit hewan menular.
4. Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif akibat fungsi pengendalian belum berjalan optimal.
5. Pengawasan Lalu lintas produk pangan asal ternak masih rendah.
6. Belum optimalnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan.
7. Terbatasnya kemampuan dan kapasitas peternak local dalam memenuhi kebutuhan telur dalam daerah.
8. Kemampuan pengolahan dan penyediaan pakan ternak secara mandiri masih sangat rendah.

Pengembangan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 - 2023 terutama dalam meningkatkan produksi dan produktifitas Ternak dalam mendukung pengembangan industri peternakan secara komprehensif, dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yaitu :

1. Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah.
2. Ketersediaan bahan baku pakan ternak masih didatangkan dari luar daerah.
3. Produktivitas usaha peternakan masih rendah.
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi.
5. Masih tingginya kejadian kasus penyakit hewan menular strategis.
6. Masih rendah ketersediaan bibit unggul dalam daerah.
7. Kebutuhan telur masih tergantung dari suplay luar daerah.

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1.Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan NTB yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 salah satunya adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan tujuan tersebut sasaran pembangunan NTB Tahun 2019-2023 yang ingin dicapai adalah *Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan indicator tujuan adalah persentase kontribusi PDRB sub sector pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.*

Berdasarkan Tujuan pembangunan NTB diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya dalam pembangunan sub sector peternakan dan kesehatan hewan mengambil sasaran dari RPJMD menjadi tujuan dalam renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan kontribusi terhadap *Terwujudnya peningkatan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan.*

4.2.Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- a. Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung capaian target RPJMD Provinsi NTB periode 2019 – 2023 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Nilai PDRB sektor Peternakan.
- b. Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung capaian target RPJMD Provinsi NTB periode 2019 – 2023 yaitu Meningkatnya Produksi Ternak dan Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

Tujuan dan sasaran tersebut ditampilkan dalam berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan		Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (non tambang) (%)	5	5,5	6	6,5	7
			Meningkatnya Produksi Ternak	Persentase Ketersedian Produksi Hasil Peternakan: - Daging - Telur			3 8	4 9
			Meningkatnya kesejahteraan peternak	NTP Peternakan (Point)	126,00	127,00	110,00	112,00
							115,00	

4.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM.

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; rehabilitasi

sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.4. Rencana Kerja Serta Target Dan Pendanaannya

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang terdiri dari 5 Program, 22 kegiatan dan 89 Sub Kegiatan. Dalam Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri dari 1 program kegiatan rutin SKPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, program prioritas SKPD yang mendukung RPJMD berdasarkan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu (1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan (4) Program Penyuluhan Pertanian.

Penjabaran program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Pagu dan Target Fisik OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU APBD PERUBAHAN TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	TARGET FISIK	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,756,304,326	Nilai SAKIP Katagori BB	
	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	566,857,900	5 Dokumen	Sekretariat dan UPTD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191,554,100	9 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38,274,000	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26,405,700	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26,030,000	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20,783,000	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62,012,700	11 Laporan	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201,798,400	4 Buku/Dok	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU APBD PERUBAHAN TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	TARGET FISIK	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,262,066,126	5 Laporan	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,042,137,026	165 Orang	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134,426,900	41 Orang	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,555,000	2 Laporan	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27,871,100	12 Kali	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,394,000	2 Laporan	
	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22,505,000	1 Laporan	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,177,100	12 Laporan	
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71,357,900	5 Dokumen	
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,700,600	3 Dokumen	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11,541,000	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36,882,000	2 Dokumen	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,234,300	3 Laporan	
d	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8,453,800	1 Laporan	
	- Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1,385,000	1 Laporan	
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7,068,800	12 Bulan	
e	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,038,500	165 Orang	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	807,000	41 Orang	
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8,970,500	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,112,000	4 Kali	
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,642,000	1 Laporan	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,917,000	2 Orang	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,090,000	165 Orang	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,500,000	2 Orang	
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245,565,650	165 Orang	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,331,600	25 Jenis	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,053,800	30 Buah	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,134,850	37 Jenis	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,572,200	11058 Buku/Lembar	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,355,000	368 Media/exemplar	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,765,100	770 Orang	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169,835,700	17 Kali	
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,517,400	1 Dokumen	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU APBD PERUBAHAN TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	TARGET FISIK	
	g Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468,279,850	50 Unit	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,555,000	8 Unit	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000	1 Unit	
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399,724,850	127 M2	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,000,000	1 Unit	
	h Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,733,829,600	1 Layanan	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,200	3800 Surat	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339,679,600	17 Jenis	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3,020,000	10 Unit	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,384,629,800	45 Orang	
	i Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364,855,000	35 Unit	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204,030,000	29 Unit	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	39,740,000	8 Unit	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,095,000	35 Unit	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74,000,000	400 m2	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,990,000	1 Unit	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	55,547,242,300	9 Persen	
	a Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	670,370,000	75 Ekor	UPTD BPTHMT
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	670,370,000	75 Ekor	
	b Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,003,169,000	11 Ha	UPTD BPTHMT
	- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	650,665,000	11 Ha	
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	352,504,000	1 Laporan	
	c Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	993,654,500	100.000 Straw	UPTD BIB
	- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	834,859,500	100.000 Straw	
	- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	158,795,000	200 Sampel	
	d Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	560,000	10 Toko/Depo	Bid.Keswan
	- Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	560,000	1 Laporan	
	e Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	52,879,488,800		Bid. Budidaya dan Sapras
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	52,724,763,200	1000 Ekor	
	- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	154,725,600	6 Kelompok	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU APBD PERUBAHAN TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	TARGET FISIK	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	206,183,600	100 Persen	
	a Penataan Prasarana Pertanian	1,442,000	9 Unit	
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	1,442,000	1 Unit	
	b Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	204,741,600	2 Lokasi	Bid. Budidaya dan Sapras
	- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	202,739,400	1 Laporan	
	- Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2,002,200	12 Kali	
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	740,088,034	< 1 Persen	
	a Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	203,193,234	5 Penyakit	Bid. Keswan
	- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	139,120,600	20000 Dosis	
	- Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21,840,700	1 Laporan	
	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	42,231,934	20 Jenis	
	b Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	49,977,800	61 Unit	Bid. Kesmavet
	- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	40,380,000	1 Laporan	
	- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1,507,800	4 Kali	
	- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	8,090,000	12 Kali	
	c Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartment Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	461,168,200	5 Sertifikat	Bid. Kesmavet
	- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartment Bebas Penyakit	1,426,200	1 Laporan	
	- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	404,242,000	5 Sertifikat	Bid. P3HP
	- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55,500,000	1000 Sampel	
	d Kesejahteraan Hewan	25,748,800	1 Persen	Bid. Kesmavet
	- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	14,106,800	35 Orang	
	- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	11,642,000	61 RPH/TPH	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	66,313,400	100 Persen	
	a Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	57,410,600	10 Kegiatan	Bid. P3HP
	- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	57,410,600	10 Jenis	
	b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8,902,800	3 Korporasi	Bid. P3HP
	- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2,046,400	3 Lembaga	
	- Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	4,106,400	3 Lembaga	
	- Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	2,750,000	2 Lembaga	
	TOTAL PAGU	73,316,131,660		

BAB V

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

5.1. Capaian Kinerja RPJMD

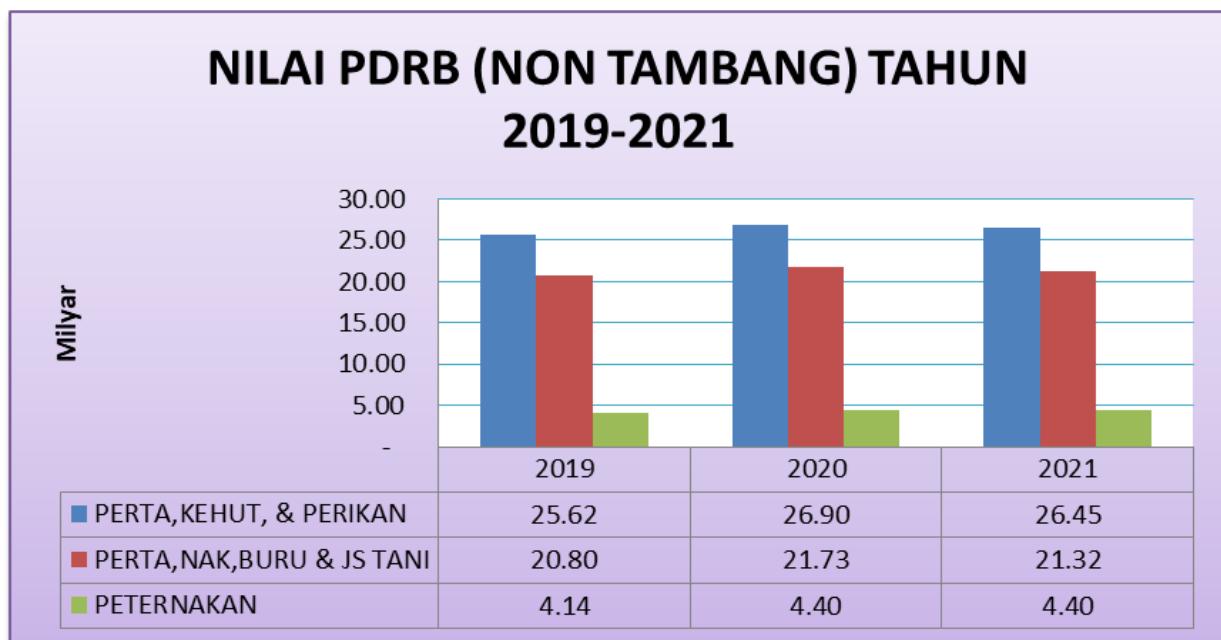
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Peternakan Provinsi tahun anggaran 2021 yaitu ***Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan.***

Tabel 5. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA RPJMD TA.2021	
			TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya peningkatan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (non tambang)	6 Persen	16,64 Persen

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Berdasarkan Tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Pertumbuhan PDRB sub sector peternakan mencapai target yang telah ditentukan. Pertumbuhan PDRB Sub sector Peternakan di Provinsi NTB tidak mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar 4,40 Milyar sama dengan tahun 2020 sebesar 4.40.Milyar. Tetapi kalau dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 16,64 persen atau 4.40 Milyar dari perolehan PDRB Pertanian tahun 2021 sebesar 26.45 Milyar. Secara umum sub sector peternakan mampu tumbuh walaupun adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor peternakan antara lain penurunan permintaan pasar dan penutupan pasar hewan, penurunan harga jual produk peternakan (live bird dan telur), penurunan populasi dan produksi ayam petelur dan ayam pedaging, terhambatnya transportasi dan distribusi produk peternakan, terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu mengantisipasi dampak Covid 19 telah dilakukan manajemen dampak/ mitigasi risiko dengan intervensi pasar untuk meningkatkan harga ternak ditingkat peternak, bantuan sarana sanitasi dan desinfeksi, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, perubahan budaya kerja melalui penerapan protokol kesehatan.

Gambar 2 PDRB (Non Tambang) di Provinsi NTB Tahun 2019-2021



(Sumber BPS NTB)

5.2. Capaian Kinerja Renstra

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2021

NO	SASARAN PERANGKAT	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	Meningkatnya Produksi Ternak	Persentase Meningkatnya Ketersedian Produksi Hasil Peternakan: - Daging - Telur	Persen Persen	3 8	6,96 35,00
2	Meningkatnya kesejahteraan peternak	NTP Peternakan	Point	110	108,61

Berdasarkan tabel 5.2. bahwa untuk memberi kontribusi terhadap terwujudnya peningkatan PDRB Pertanian secara umum, maka OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkontribusi meningkatkan PDRB Sub Sektor Peternakan. Meningkatnya PDRB sub sector peternakan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ternak dengan indikator adalah meningkatnya produksi daging dan produksi telur.

Tabel 5. 3 Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2021

No	Uraian	Ketersedian Produksi (Ton) Tahun		
		2020	2021	Naik/Turun (%)
A.	Ketersediaan Produksi Daging			
	- Sapi	13.801,0	14.242,6	3,20
	- Kerbau	1.426,0	1.451,7	1,80
	- Kuda	606,0	647,8	6,90
	- Kambing	663,0	696,2	5,01
	- Domba	28,0	29,0	3,57
	- Babi	144,0	147,9	3,57
	- Ayam Ras	46.281,9	48.942,3	5,75
	- Ayam Buras	10.565,0	12.308,2	16,50
	- Itik	762,0	979,9	28,60
B.	Jumlah	74.278,86	79.445,58	6,96
	Ketersediaan Produksi Telur			
	- Ayam Ras	43.374,1	64.986,9	49,83
	- Ayam Buras	32.330,9	37.673,3	16,52
	- Itik	7.192,6	9.251,2	28,62
	Jumlah	82.897,6	111.911,4	35,00

Subsektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersedian Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi dalam bentuk meatyield. Pada tahun 2021, capaian ketersediaan produksi daging sebesar 79.445,58 ton atau meningkat 6,96 persen dari tahun 2020 yaitu sebesar 74.276,68. Bila dilihat sasaran indikator kinerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB terhadap peningkatan ketersedian produksi daging yang ditargetkan tahun 2021 adalah sebesar 3 persen, berdasarkan realisasi sebagai mana tabel 5.3 diatas dapat dicapai 6,96 persen atau terealisasi diatas 200 persen. Bila dilihat dari tingkat konsumsi daging tahun 2021 tingkat konsumsi daging masyarakat NTB sebesar 10,43 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 6,54 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,79 Kg/kapita/tahun. Tingginya produksi daging tahun 2021 karena tingginya masuk DOC unggas yaitu sebesar 49.719.370 ekor dari luar NTB.

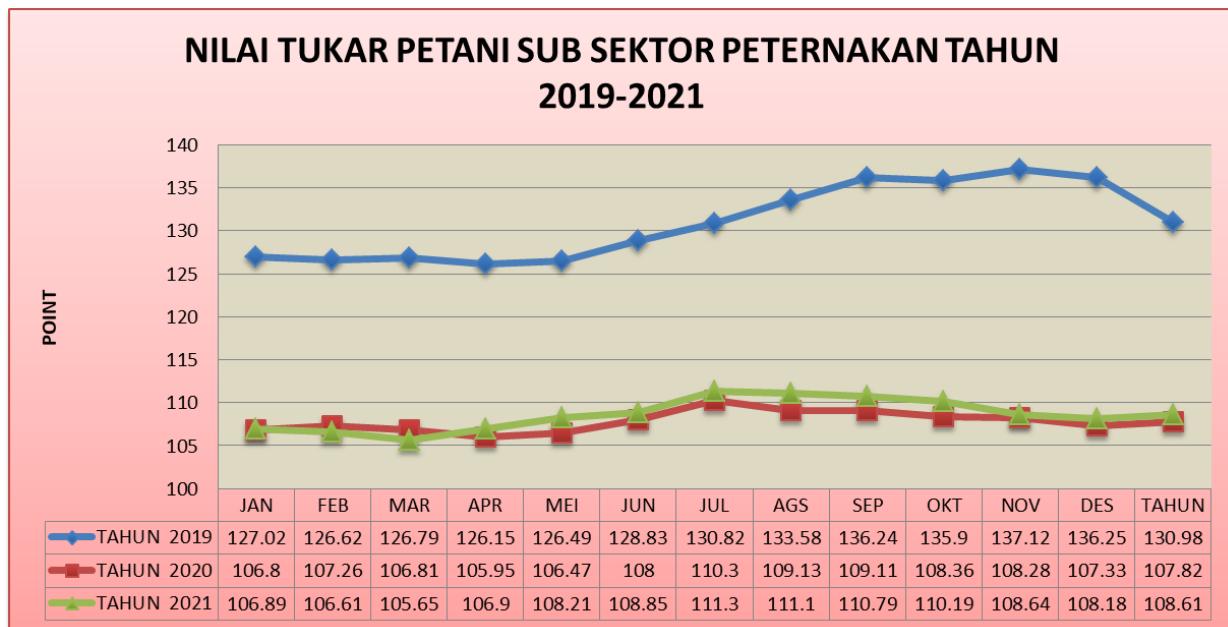
Ketersedian Produksi telur tahun 2021 sebesar 111.911,40 ton atau mengalami peningkatan sebesar 35 persen apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2020 yaitu sebesar 82.897,60. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi telur ayam buras meningkat 16,28 persen (5.342,4 ton), telur ayam ras 49,83 persen (21.612,0 ton), telur itik

28,62 persen (2.058,6 ton), hal ini dapat dilihat dengan tinggi distribusi masuknya DOC selama tahun 2021 dari luar daerah yakni sebesar 6.410.000 ekor dan telur bibit ayam yang masuk selama tahun 2021 sebesar 18.580.710 butir. Selain itu, peningkatan pertumbuhan produksi telur ini, salah satunya didorong oleh peningkatan konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat saat masa pandemi Covid19 serta adanya event internasional di NTB. Konsumsi telur selama tahun 2021 sebesar 16,83 kg/kapita/Tahun dari tahun 2020 yang hanya sebesar 12,26 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 37,28 persen.

Sasaran OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021 yang kedua yaitu sasaran meningkatnya kesejahteraan peternak dengan indikator sasarannya yaitu meningkatnya Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan. Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani peternakan (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani peternakan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani peternakan di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi peternakan. Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk peternakan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi

Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan > 100 , berarti petani peternakan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani peternakan naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan = 100, berarti petani peternakan mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani peternakan sama dengan pengeluarannya. Nilai Tular Petani Sub Sektor Peternakan < 100 , berarti petani peternakan mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani peternakan turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar 3 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan di Provinsi NTB Tahun 2020-2021



Rata-rata NTP Sub Sektor Peternakan tahun 2021 sebesar 108,61 sedangkan rata-rata NTP Sub Sektor Peternakan tahun 2020 sebesar 107,82 atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 point dibandingkan tahun 2020. Bila dilihat dari target kinerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 untuk indikator sasaran peningkatan NTP Sub Sektor Peternakan dengan target 110 poin namun hanya terealisasi 108,61 point atau (98,73 persen). Hal ini disebabkan salah satunya oleh fluktuatifnya harga ayam broiler hidup (liverbird) dan harga telur sementara kenaikan beberapa harga biaya produksi seperti pakan dan harga bibit ayam/Day Old Chick (DOC). Upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan NTPP di atas 100 dilakukan dengan meningkatkan indeks yang diterima peternak berupa peningkatan harga ternak dan produk hasil ternak serta menurunkan indeks yang harus dibayar peternak, utamanya komponen biaya produksi.

5.3. Capaian Kinerja Renja OPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 73.316.131.660. Realisasi Penyerapan anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 60.538.174.933. (82,57 Persen) dan realisasi fisik kegiatan sebesar (100 Persen). Untuk rincian belanja per program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 4 Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU APBD PERUBAHAN TAHUN 2021		REALISASI APBD PERUBAHAN TAHUN 2021				SISA PAGU	PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	TARGET FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,756,304,326	BB Sakip	15,713,162,683	93.77	BB Sakip	100	1,043,141,643	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	566,857,900	5 Dokumen	380,367,190	67.10	5 Dokumen	100	186,490,710	Sekretariat dan UPTD
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191,554,100	9 Dokumen	126,784,100	66.19	9 Dokumen	100	64,770,000	Honor Tenaga Kontrak Tunda bayar
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38,274,000	2 Dokumen	37,630,000	98.32	2 Dokumen	100	644,000	
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26,405,700	2 Dokumen	26,345,100	99.77	2 Dokumen	100	60,600	
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26,030,000	2 Dokumen	25,375,000	97.48	2 Dokumen	100	655,000	
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20,783,000	2 Dokumen	9,553,000	45.97	2 Dokumen	100	11,230,000	Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritis Realisasi Kinerja SKPD	62,012,700	11 Laporan	56,341,000	90.85	11 Laporan	100	5,671,700	
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201,798,400	4 Buku/Dokumen	98,338,990	48.73	4 Buku/Dokumen	100	103,459,410	Perjalanan Dinas pendataan tidak dilaksanakan
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,262,066,126	5 Laporan	12,877,183,424	97.10	5 Laporan	100	384,882,702	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,042,137,026	165 Orang	12,684,727,974	97.26	135 Orang	82	357,409,052	Honor Tenaga Kontrak Tunda bayar
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134,426,900	60 Orang	113,122,900	84.15	60 Orang	100	21,304,000	Honor Tenaga Kontrak Tunda bayar
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,555,000	1 Laporan	428,000	9.40	1 Laporan	100	4,127,000	
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27,871,100	14 Kali	27,152,000	97.42	14 Kali	100	719,100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,394,000	2 Laporan	5,332,500	98.86	2 Laporan	100	61,500	
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22,505,000	1 Laporan	22,329,500	99.22	1 Laporan	100	175,500	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25,177,100	15 Laporan	24,090,550	95.68	15 Laporan	100	1,086,550	
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71,357,900	5 Dokumen	50,704,000	71.06	5 Dokumen	100	20,653,900	
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,700,600	3 Dokumen	9,561,700	98.57	3 Dokumen	100	138,900	
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11,541,000	2 Dokumen	6,444,000	55.84	2 Dokumen	100	5,097,000	
-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36,882,000	2 Dokumen	21,745,000	58.96	2 Dokumen	100	15,137,000	
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,234,300	3 Laporan	12,953,300	97.88	3 Laporan	100	281,000	
d	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8,453,800	1 Laporan	6,308,000	74.62	1 Laporan		2,145,800	
-	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1,385,000	1 Laporan	-	-	1 Laporan	100	1,385,000	
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7,068,800	12 Bulan	6,308,000	89.24	12 Bulan	100	760,800	
e	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,038,500	165 Orang	31,146,900	88.89	165 Orang	100	3,891,600	
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	807,000	41 Orang	807,000	100.00	41 Orang	100	-	
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8,970,500	2 Dokumen	8,493,900	94.69	2 Dokumen	100	476,600	
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,112,000	4 Kali	10,002,000	98.91	4 Kali	100	110,000	
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,642,000	1 Laporan	2,607,000	98.68	1 Laporan	100	35,000	
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,917,000	2 Orang	4,637,000	94.31	2 Orang	100	280,000	
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,090,000	165 Orang	2,100,000	41.26	165 Orang	100	2,990,000	
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,500,000	2 Orang	2,500,000	100.00	2 Orang	-	-	

	f Administrasi Umum Perangkat Daerah	245,565,650	165 Orang	172,811,300	70.37	135 Orang	82	72,754,350	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,331,600	25 Jenis	5,557,500	53.79	25 Jenis	100	4,774,100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,053,800	30 Buah	19,043,400	99.95	30 Buah	100	10,400	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,134,850	37 Jenis	9,492,350	93.66	37 Jenis	100	642,500	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,572,200	11058 Buku/Lembar	8,296,200	96.78	11058 Buku/Lembar	100	276,000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,355,000	368 Media/exemplar	7,455,000	65.65	368 Media/exemplar	100	3,900,000	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,765,100	770 Orang	10,819,000	91.96	770 Orang	100	946,100	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169,835,700	17 Kali	109,174,050	64.28	17 Kali	100	60,661,650	Perjalanan Dinas
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,517,400	1 Dokumen	2,973,800	65.83	1 Dokumen	100	1,543,600	
	g Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468,279,850	50 Unit	403,673,000	86.20	50 Unit	100	64,606,850	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,555,000	3 Unit	-	-	3 Unit	100	63,555,000	Tunda bayar pengadaan Sepeda Listrik
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000	1 Unit	3,000,000	100.00	1 Unit	100	-	
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399,724,850	127 M2	398,953,000	99.81	127 M2	100	771,850	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,000,000	1 Unit	1,720,000	86.00	1 Unit	100	280,000	
	h Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,733,829,600	1 Layanan	1,569,645,409	90.53	1 Layanan	100	164,184,191	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,200	3800 Surat	4,276,000	65.78	3850 Surat	137	2,224,200	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339,679,600	17 Jenis	285,350,909	84.01	17 Jenis	100	54,328,691	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3,020,000	4 Unit	3,020,000	100.00	Unit	100	-	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,384,629,800	45 Orang	1,276,998,500	92.23	45 Orang	100	107,631,300	Honor Kontrak Bulan Desember
	i Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364,855,000	35 Unit	221,323,460	60.66	35 Unit	100	143,531,540	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	204,030,000	29 Unit	155,125,046	76.03	29 Unit	100	48,904,954	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	39,740,000	8 Unit	28,232,554	71.04	8 Unit	100	11,507,446	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,095,000	35Unit	27,975,860	75.42	35Unit	100	9,119,140	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74,000,000	400 m2	3,885,000	5.25	400 m2	100	70,115,000	Tunda Bayar Pemeliharaan Gedung Kantor
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,990,000	1 Unit	6,105,000	61.11	1 Unit	100	3,885,000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	55,547,242,300	9 Persen	44,112,936,100	79.42	2 Persen	22	11,434,306,200	Data Sementara
	a Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	670,370,000	75 Ekor	611,670,000	91.24	65 Ekor	87	58,700,000	UPTD BPTHMT
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	670,370,000	75 Ekor	611,670,000	91.24	65 Ekor	87	58,700,000	
	b Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,	1,003,169,000	6 Ha	907,578,000	90.47	6 Ha	100	95,591,000	UPTD BPTHMT
	- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan	650,665,000	11 Ha	594,195,000	91.32	11 Ha	100	56,470,000	
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak,	352,504,000	1 Laporan	313,383,000	88.90	1 Laporan	100	39,121,000	
	c Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	993,654,500	100.000 Dosis/Straw	933,301,500	93.93	98.250 Dosis/Straw	98	60,353,000	UPTD BIB
	- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	834,859,500	100.000 Straw	805,059,500	96.43	98.250 Straw	98	29,800,000	
	- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	158,795,000	200 Sampel	128,242,000	80.76	200 Sampel	100	30,553,000	
	d Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	560,000	10 Toko/Depo	560,000	100.00	10 Toko/Depo	100	-	Bid.Keswan
	- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	560,000	1 Laporan	560,000	100.00	1 Laporan	100	-	
	e Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	52,879,488,800	1000 ekor	41,659,826,600	78.78	1000 ekor	100	11,219,662,200	Bid. Budidaya dan Sapras
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	52,724,763,200	1000 Ekor	41,505,826,600	78.72	1000 Ekor	100	11,218,936,600	
	- Pengadaan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	154,725,600	6 Kelompok	154,000,000	99.53	6 Kelompok	100	725,600	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	206,183,600	100 Persen	205,071,600	99.46	100 Persen	50	1,112,000	
	a Penataan Prasarana Pertanian	1,442,000	9 Unit	1,330,000	92.23	9 Unit	100	112,000	
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	1,442,000	1 Unit	1,330,000	92.23	1 Unit	100	112,000	
	b Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1	204,741,600	2 Lokasi	203,741,600	99.51	1 Lokasi	50	1,000,000	Bid. Budidaya dan Sapras
	- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	202,739,400	1 Laporan	201,739,400	99.51	1 Laporan	100	1,000,000	
	- Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2,002,200	12 Kali	2,002,200	100.00	12 Kali	100	-	

4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	740,088,034	1 Persen	449,264,550	60.70	0,06 Persen	100	290,823,484	
	a Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	203,193,234	5 Penyakit	185,874,750	91.48	5 Penyakit	100	17,318,484	Bid. Keswan
	- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	139,120,600	20050 Dosis	127,173,100	91.41	18327 Dosis	91	11,947,500	
	- Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21,840,700	1 Laporan	21,740,700	99.54	1 Laporan	100	100,000	
	- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	42,231,934	910 Jenis	36,960,950	87.52	796 Jenis	88	5,270,984	
	b Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	49,977,800	61 Unit	31,712,800	63.45	61 Unit	100	18,265,000	Bid. Ksmavet
	- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	40,380,000	1 Laporan	22,835,000	56.55	1 Laporan	100	17,545,000	
	- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk	1,507,800	4 Kali	1,507,800	100.00	4 Kali	100	-	
	- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	8,090,000	12 Kali	7,370,000	91.10	12 Kali	100	720,000	
	c Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompeten Bebas Penyakit dan Unit Usaha	461,168,200	5 Sertifikat	205,960,000	44.66	5 Sertifikat	100	255,208,200	Bid. Ksmavet
	- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1,426,200	1 Laporan	1,426,200	100.00	1 Laporan	100	-	
	- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	404,242,000	5 Sertifikat	176,813,800	43.74	5 Sertifikat	100	227,428,200	Bid. P3HP
	- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55,500,000	5 Sertifikat	27,720,000	49.95	5 Sertifikat	100	27,780,000	
	d Kesejahteraan Hewan	25,748,800	1 Persen	25,717,000	99.88	1 Persen	100	31,800	Bid. Ksmavet
	- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	14,106,800	35 Orang	14,085,000	99.85	35 Orang	100	21,800	
	- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	11,642,000	61 RPH/TPH	11,632,000	99.91	61 RPH/TPH	100	10,000	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	66,313,400	100 Persen	57,740,000	87.07	100 Persen	83	8,573,400	
	a Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	57,410,600	10 Kegiatan	49,265,600	85.81	10 Kegiatan	100	8,145,000	Bid. P3HP
	- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	57,410,600	10 Jenis	49,265,600	85.81	10 Jenis	100	8,145,000	
	b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8,902,800	3 Korporasi	8,474,400	95.19	2 Korporasi	67	428,400	Bid. P3HP
	- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	2,046,400	3 Lembaga	1,945,000	95.04	2 Lembaga	67	101,400	
	- Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	4,106,400	3 Lembaga	3,909,400	95.20	2 Lembaga	67	197,000	
	- Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Kooperasi Petani	2,750,000	2 Lembaga	2,620,000	95.27	2 Lembaga	100	130,000	
	TOTAL	73,316,131,660		60,538,174,933	82.57			12,777,956,727	

Dari tabel 5.4. dapat diuraikan capaian masing-masing program/kegiatan baik keuangan maupun fisik sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah teralokasi Pagu sebesar Rp. 16.756.304.326 dengan realisasi sebesar Rp.15.713.162.683 atau (93,77 persen). Untuk pagu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdistribusi pada masing-masing unit kerja yaitu pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target capaian Nilai SAKIP OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 adalah Katagori BB Katagori yang menunjukan akuntabilitas kinerja sangat baik. Tahun 2021 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implemntasi SAKIP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021 oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 700/70-VIII/LHE.Ltp.H-INSP/2021 tanggal

19 Agustus 2021, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 75,62 Katagori BB (Sangat Baik). Meningkat perolehan nilai SAKIP sebesar 1,62 poin pada tahun 2021 dibanding Tahun 2020 dengan Nilai 74,00 katagori BB (Sangat Baik).

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah pagu Rp.566.857.900 realisasi Rp.380.367.190,- atau (67,10 persen), rendahnya realisasi tersebut dikarena tidak terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di kabupaten karena pembatasan biaya perjalanan dinas dan tertundanya pembayaran tenaga kontrak bulan Desember 2021. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pagu Rp.13.262.066.126 realisasi Rp.12.684.727.974,- atau (97,10 persen), tidak tercapai realisasi tersebut sesuai target dikarena tertundanya pembayaran TTP PNS dan honorarium tenaga kontrak bulan Desember 2021. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah pagu Rp.71.357.900 realisasi Rp.50.704.000,- atau (71,06 persen), rendahnya realisasi tersebut karena pembatasan biaya perjalanan dinas. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Jumlah pagu Rp.8.453.800 realisasi Rp.6.308.000,- atau (74,62 persen), rendahnya realisasi tersebut karena tidak dilaksanakanya kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi asset di UPTD pembatasan SPD. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pagu Rp.35.038.500 realisasi Rp.31.146.900,- atau (88,89 persen), rendahnya realisasi tersebut karena pembatasan di keluarkan SPD. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pagu Rp.245.565.650 realisasi Rp.172.811.300,- atau (70,37 persen), rendahnya realisasi tersebut karena pembatasan biaya perjalanan dinas dan pembatasan di keluarkan SPD. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pagu Rp.468.279.850 realisasi Rp.403.673.000,- atau (86,20 persen), rendahnya realisasi tersebut karena tertuntanya pembayaran pengadaan sepeda listrik sebanyak 3 Unit. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.

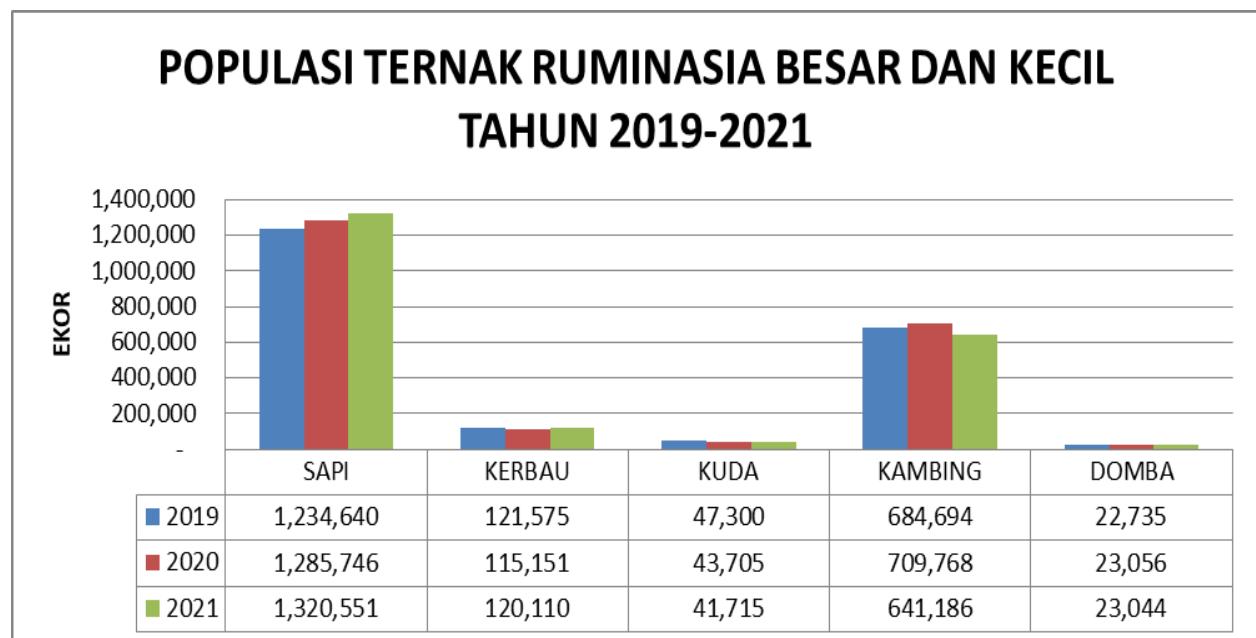
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pagu Rp.1.733.829.600 realisasi Rp.1.569.645.409,- atau (90,53 persen), rendahnya realisasi tersebut karena tertuntanya pembayaran Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Bulan Desember 2021 di Dinas dan UPTD. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pagu Rp.364.855.000 realisasi Rp.221.323.460,- atau (60,66 persen), rendahnya realisasi tersebut karena pembatasan biaya pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas dan UPTD dan tertundanya pembayaran kontrak pemeliharaan gedung kantor. Untuk realisasi fisik terealisasi 100 persen.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

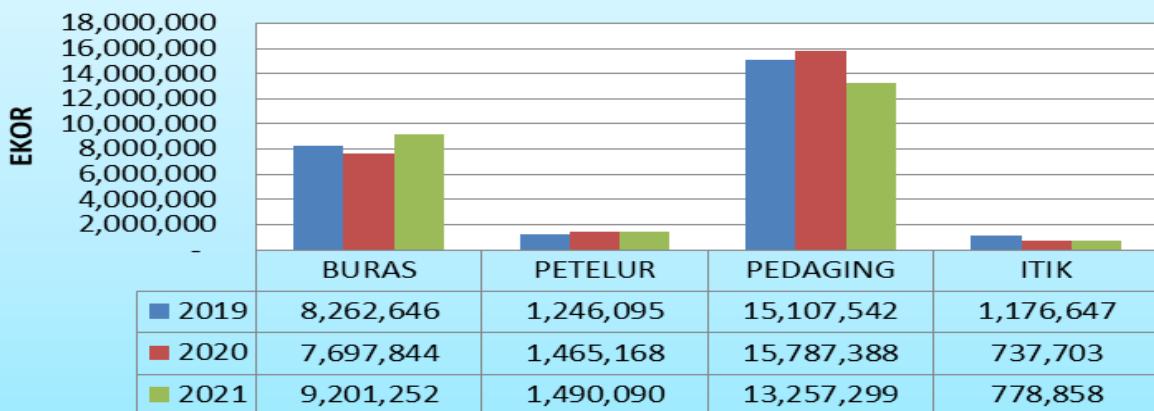
Tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian teralokasi Pagu sebesar Rp. 55.547.242.300 dengan realisasi sebesar Rp.44.112.936.100 atau (74.42 persen). Capaian realisasi keuangan pada program ini masih rendah karena adanya kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak bisa terealisasi pembayarannya karena tidak tersedianya dana dari kas umum daerah atau ditunda pembayarannya di tahun 2022.

Untuk Capaian kinerja pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu peningkatan populasi ternak sebagai berikut :

Gambar 3 Populasi Ternak Tahun 2019-2021 (Data Sementara)



POPULASI TERNAK UNGGAS TAHUN 2019-2021



Tabel 5. 5 Target dan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2021 (Data Sementara)

KOMODITI	SATUAN	2020	2021			
			Target	r (%)	Realisasi	r (%)
Sapi	Ekor	1,285,746	1,362,891	6	1,320,551	3
Kerbau	Ekor	115,151	117,454	2	120,110	2
Kambing	Ekor	709,768	752,354	6	641,186	1
Unggas	Ekor	25,688,103	31,076,183	21	24,727,499	3
% RATA-RATA PERTUMBUHAN POPULASI TERNAK	%			9		2

Berdasarkan tabel 5.5. diatas capaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dari target output tahun 2021 yaitu peningkatan populasi sebesar 9 persen hanya terealisasi sebesar 2 persen atau sebesar 22 persen. capaian ini merupakan data sementara, karena untuk pertumbuhan populasi, akan dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan Kabupaten/Kota, setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi dengan kecamatan masing-masing pada bulan Februari-Maret 2022. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dilakukan paling lambat bulan Maret 2022.

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian target Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Tahun 2021 kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi teralokasi pagu sebesar 670.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 544.470.000,- atau (81,22 persen). Rendahnya realisasi karena

adanya kegiatan yang ditunda pembayarannya yaitu pembayaran Jasa Tenaga Pemelihara Ternak dan HMT di UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading untuk Bulan Desember 2021. Sedangkan untuk Output kegiatan ditargetkan jumlah ternak yang dihasilkan sebesar 75 ekor kelahiran ternak dapat tercapai sebesar 65 ekor atau sebesar 87 persen. Berdasarkan data kelahiran tersebut maka tingkat pertumbuhan populasi Sapi di UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading untuk tahun 2021 sebesar 72 Persen.

Sedangkan untuk Hijauan Pakan Ternak UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading menghasilkan produksi benih legume sebanyak 515 Kg dan telah terdistribusi sebanyak 344 kg yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur, Riau, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan NTT serta 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

2. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Tahun 2021 kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi teralokasi pagu sebesar 1.003.169.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 846.458.000,- atau (84,38 persen). Rendahnya realisasi karena adanya kegiatan yang ditunda pembayarannya yaitu pembayaran Jasa Tenaga Pemelihara Ternak dan HMT di BP3TR untuk Bulan Desember 2021. Sedangkan untuk Output kegiatan ditargetkan adalah jumlah lahan Hijauan Pakan Ternak yaitu seluar 6 Ha dengan realisasi 6 Ha atau sebesar 100 persen. Lahan yang dikelolah untuk penanaman HMT selama tahun 2021 telah menghasilkan produksi HMT dari rumput odot, rumput gajah, benggala dan lainnya yang dihasilkan sebanyak 1050 Ton pertahun . Hasil produksi HMT dimanfaatkan untuk pemberian pakan ternak yang dipelihara di BP3TR yaitu ternak sapi sebanyak 57 ekor.

3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi. Untuk kegiatan ini output yang menjadi target adalah jumlah produksi semen beku pada UPTD Balai Inseminasi Buatan sebanyak 100.000 dosis/Straw. Sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi adalah sebesar Rp. 993.654.500,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 933.301.500 (93,93 persen), sementara realisasi output kegiatan sebanyak 72.943 (72,94 persen).

Dalam kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi terdiri dari 2 sub kegiatan yakni pertama Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berorientasi pada produksi Semen Beku yang menjadi output kegiatan ini.

Berikut disajikan data hasil produksi semen beku pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5. 6 Data Hasil Produksi Semen Beku Pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021

No.	NAMA Bull	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Haemsa	-	902	807	614	604	307	-	-	-	-	-	-	3,234
2	Suriad	552	1,164	1,637	1,277	1,552	1,041	-	447	987	762	1,700	1,113	12,232
3	Rider	619	1,073	1,290	1,621	1,492	849	-	298	1,013	652	1,501	1,867	12,275
4	Rintam	1,594	887	1,696	2,092	1,742	1,479	-	327	1,492	-	-	-	11,309
5	Baros	-	1,604	2,158	2,444	1,769	1,220	-	358	1,257	520	1,670	2,352	15,352
6	Summaros	172	771	1,222	1,336	1,097	752	-	204	744	475	1,175	1,354	9,302
7	Pancardin	652	650	1,296	1,297	1,104	852	-	96	802	300	879	1,211	9,139
8	Bima	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	TOTAL	3,589	7,051	10,206	10,681	9,360	6,500	-	1,730	6,295	2,709	6,925	7,897	72,943

Berdasarkan tabel 5.6. diatas hasil dari produksi semen beku dari Balai Inseminasi Buatan, menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.600.000.000 atau setara dengan 100.000 Dosis/straw yang diproduksi. Realisasi PAD pada BIB tahun 2021 sebesar Rp. 599.364.500,- atau sebanyak 99,89 persen.

Untuk Sub Kegiatan kedua yakni Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan dengan rincian belanja adalah : Jasa Sertifikasi, Kalibrasi Peralatan Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Laboratorium. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan dengan cara melakukan pemeriksaan uji kualitas semen segar dan semen beku yang diproduksi.

Belanja Sertifikasi Produk Ternak (Semen Beku) Balai Inseminasi Buatan dilaksanakan dalam bentuk Pendampingan/ Pelatihan oleh Konsultan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Inseminasi Buatan sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan sertifikasi produk semen beku. Kegiatan ini dapat terealisasi 100 %. Pelaksanaan kegiatan Pendampingan/ Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021 bertempat di Balai Inseminasi Buatan NTB yang diikuti oleh 18 (delapan belas) orang peserta dari Balai Inseminasi Buatan. Tenaga Ahli yang menjadi narasumber pada kegiatan ini berasal dari PT. Gamma Management Consulting.

Pendampingan/ Pelatihan ini meliputi: Pengkajian Awal (*Diagnostic Assessment*), Refreshment Sistem Manajemen Mutu, Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu, Bimbingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Refreshment Audit Internal dan Penerapannya seta Bimbingan Tinjauan Manajemen.

Dalam pelaksanaannya peserta dibekali pengetahuan untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam menerapkan system Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 serta tata cara melakukan audit internal. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Audit Internal sangat esensial dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Balai Inseminasi Buatan NTB untuk menghasilkan produk semen beku yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Output dari kegiatan Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini adalah peserta diharapkan memiliki pemahaman mengenai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan persyaratan yang ada. Kelanjutan dari kegiatan Pendampingan/ Pelatihan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini adalah Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Lembaga auditor independent. Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015 ini dilakukan oleh Tim Auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia.

Tahapan audit diawali dengan pemeriksaan dokumen terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu, kemudian pelaksanaan audit dilakukan secara daring pada tanggal 15 November 2021. Setelah melewati tahapan audit, dilakukan perbaikan atas hasil temuan audit hingga diterbitkannya Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 pada tanggal 26 November 2021. Sertifikat audit ini berlaku selama tiga tahun hingga tanggal 25 November 2024, surveilans akan dilakukan setiap tahun setelah penerbitan sertifikat.

Kegiatan selanjutnya adalah kalibrasi peralatan laboratorium. Kalibrasi alat rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai salah satu persyaratan penerapan system manajemen

mutu. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pada Tahun 2021 terdapat pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit mikroskop trinocular yang dilengkapi dengan kamera mikroskop dan layar monitor 24 inch. Pengadaan 1 set mikroskop ini bertujuan untuk meningkatkan performa uji laboratorium Balai Inseminasi Buatan NTB. Target pengujian sampel pada tahun 2021 adalah 200 sampel dari 7 ekor Bull yang telah bersertifikat SNI.

Tabel 5. 7 Realisasi pemeriksaan uji Post Thawing Motility (PTM) adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah PTM
1	Januari	28
2	Februari	66
3	Maret	102
4	April	100
5	Mei	94
6	Juni	58
7	Juli	0
8	Agustus	14
9	September	70
10	Oktober	38
11	November	76
12	Desember	68
	Total	714

Sehingga total pemeriksaan sampel terhadap semen beku yang dirproduksi adalah 714 sampel. Sesuai dengan persyaratan pada SNI 4869-1: 2017, semen beku sapi sesudah dicairkan kembali (post thawing) pada suhu 37 °C - 38°C selama 30 detik harus memiliki motilitas spermatozoa minimum 40%. Semen beku yang dihasilkan oleh BIB NTB yang diedarkan telah melewati uji PTM dan sesuai dengan persyaratan yang ada.

4. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor.

Untuk pengawasan peredaran obat hewan ditingkat distributor, karena mengalami refocusing anggaran, maka pelaksanaan ini didukung melalui kegiatan APBN dari target output yang dilakukan pengawasan 10 Depo/Toko obat hewan yang dilakukan pengawasan di 10 kabupaten/kota.

5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Untuk kegiatan ini output yang menjadi target adalah jumlah bibit ternak yang diadakan sebanyak 1000 ekor. Sedangkan pagu anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan

Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi lain adalah sebesar Rp. 58.879.488.800,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 41.659.826.600 (76,78 persen), sementara realisasi output kegiatan sebanyak 100 persen. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini karena adanya kegiatan yang pembayarannya tertunda di 2022, yaitu kegiatan bantuan barang/jasa/hibah barang kepada masyarakat atau kelompok tani ternak. Data bantuan ternak baik berupa barang/jasa/uang tahun 2021.

Tabel 5. 8 Daftar Bantuan Ternak/ Srana dan Prasarana Peternakan/ Hibah Uang Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	HIBAH BARANG																JUMLAH			HIBAH UANG									
		SAPI		KAMBING		AYAM		ITIK		SAPI DAN KANDANG		AYAM DAN KANDANG		KANDANG SAPI		KANDANG UNGGAS		MESIN		ALAT SARANA ABON		PAKAN		WALET						
		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml						
		Kipk	Ekor	Kipk	Ekor	Kipk	Ekor	Kipk	Ekor	Kipk	Ekor	Kipk	Ekor	Kipk	Unit	Kipk	Unit	Kipk	Unit	Kipk	kg	Kipk	Unit	Kipk	Ekor/U nit	Jml	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)		
1	Kota Mataram	1	8																						5	8	5	71,000,000	66,500,000	
2	Lombok Barat	7	61	4	56	5	7,500	18	2,700	1	5	16	9,320	3	0	4	4							1	1	59	19,647	2	49,000,000	26,000,000
3	Lombok Utara	1	17			1	1,010					3	2,010			1	1								6	3,038	3	70,000,000	70,000,000	
4	Lombok Tengah	27	188	2	16	14	4,410	20	3,010			19	9,334			3	3					6		85	16,961	5	441,500,000	351,500,000		
5	Lombok Timur	29	233	5	71	11	4,355	71	11,300			31	15,500	1	1	1	1				1	80		149	31,461	18	745,000,000	745,000,000		
Jumlah P. Lombok		65	507	11	143	31	17,275	109	17,010	1	5	73	36,164	4	1	9	9	0	0	0	0	7	80	1	1	304	71,115	33	1,376,500,000	1,259,000,000
6	Sumbawa Barat	7	88	1	10						6	3,000			1	1								15	3,099	2	54,500,000	26,000,000		
7	Sumbawa	12	143			3	990				22	11,000					1	1	1	1				39	12,135	19	926,000,000	926,000,000		
8	Dorpu	2	27	1	27						2	1,000												5	1,054	8	76,000,000	76,000,000		
9	Bima	2	30	3	15			1	80		2	1,000												8	1,125	23	402,500,000	383,500,000		
10	Kota Bima	1	5	1	5	1	310				4	2,000												7	2,320	12	171,500,000	162,000,000		
Jumlah P. Sumbawa		24	293	6	57	4	1,300	1	80	0	0	36	18,000	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	74	19,733	64	1,630,500,000	1,573,500,000		
TOTAL		89	800	17	200	35	18,575	110	17,090	1	5	109	54,164	4	1	10	10	1	1	1	1	7	80	1	1	378	90,848	97	3,007,000,000	2,832,500,000

Berdasarkan tabel 5.8. bahwa pada tahun 2021 bantuan berupa ternak sapi dialokasikan sebanyak 90 kelompok tani, 16 kelompok kambing, 144 kelompok ayam, 110 kelompok itik dan kelompok penerima bantuan kandang baik sapi dan unggas sebanyak 14 kelompok, peralatan mesin 2 kelompok, dan kelompok pakan 7 kelompok. Untuk jumlah ternak yang terdistribusi untuk ternak ruminasia (sapi, Kambing) sebanyak 1005 ekor sedangkan untuk ternak unggas (ayam dan itik) sebanyak 89.829 ekor.

Sedangkan untuk kelompok ternak yang mendapatkan bantuan hibah uang sebanyak 97 kelompok tani ternak dengan jumlah pagu 3.007.000.000 dengan realisasi pagu sebesar 2.832.500.000,- atau 94,19 persen. Kelompok tani ternak penerima hibah uang, belanja disesuaikan dengan usulan proposal yang telah diajukan.

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Jenis Kegiatan Dan Jumlah Kelompok Penerima Hibah Uang Tahun 2021.

NO	KAB/KOTA	HIBAH UANG (KELOMPOK)					JUMLAH
		SAPI	KAMBING	AYAM	ITIK	KANDANG	
1	Kota Mataram	-	-	3	-	1	4
2	Lombok Barat	-	1	-	-	-	1
3	Lombok Utara	-	-	3	-	-	3
4	Lombok Tengah	2	-	1	-	1	4
5	Lombok Timur	5	-	10	2	1	18
Jumlah P. Lombok		7	1	17	2	3	30
6	Sumbawa Barat	-	-	1	-	-	1
7	Sumbawa	14	1	4	-	-	19
8	Dompu	-	5	3	-	-	8
9	Bima	5	10	5	1	-	21
10	Kota Bima	1	-	10	-	-	11
Jumlah P. Sumbawa		20	16	23	1	-	60
TOTAL		27	17	40	3	3	90

c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian teralokasi pagu sebesar Rp. 206.183.600,- dan terealisasi 205.071.600,- (99,46 persen). Adapun indikator output dari program ini yaitu cakupan pengembangan wilayah sumber bibit ternak sebanyak 2 lokasi, namun hanya terealisasi 1 lokasi, kegiatan yang mendukung program ini adalah kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan indikator output adalah pembuatan dokumen masterplan pengembangan kawasan labangkan sebagai foot estate yang terintegrasi antaran ternak jagung dan sapi .

Kawasan food estate ternak sapi dan jagung adalah suatu kawasan yang menerapkan sistem usaha pengembangan dengan menintegrasikan tanaman jagung dengan ternak sapi dalam suatu sistem usaha tani terpadu agar lebih menguntungkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jagung dan ternak sapi seluas 11.000 Ha yang berada di 5 desa di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB untuk menjamin masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis, menjaga dan mengamankan potensi NTB sebagai sentral ternak

sapi bali nasional dengan melindungi ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Tahun 2021 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner teralokasi pagu sebesar Rp. 740.088.094,- dan terealisasi 449.264.550,- (60,70 persen). Program ini terbagi dalam 2 fungsi yaitu fungsi kesehatan hewan tujuannya untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH.

Untuk target output Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) di bawah 1 persen. PHMS tersebut yaitu Penyakit Rabies, Antrak, Brucellosis, Avian Influenza dan Hoq Cholera), berdasarkan hasil Data Situasi kejadian penyakit ini diperoleh dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan melalui program iSIKHNAS. Kejadian ini sebagian besar berdasarkan gejala klinis (suspect) hanya rata-rata sebesar 0,06 persen atau realisasi output 100 persen.

Sementara rendahnya realisasi keuangan yang hanya 60,70 persen, dikarenakan adanya kegiatan pada fungsi Kesehatan Masyarakat Veterinaer yaitu pada sub kegiatan pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi unit usaha yang tidak terealisasi kegiatannya yaitu pelatihan pengolahan usaha burung wallet di Kabupaten Sumbawa, sementara untuk pembangunan pengolahan sarang burung wallet fisiknya dapat teralisasi 100 persen, tetapi keuangannya ditunda pembayarannya di tahun 2022. Adapun rincian masing kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu pengendalian resiko dan penaggulangan penyakit hewan zoonosis, pembebasan penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah dan penaggulangan daerah yang terdampak wabah penyakit hewan menular. Rata-rata capaian realisasi keuangan untuk sub kegiatan adalah 95,00 persen, sementara realisasi fisik dapat dicapai sebesar rata-rata 98 persen. Berikut kami sampaikan Data Situasi kejadian penyakit tahun 2021 ini diperoleh dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan melalui program iSIKHNAS. Kejadian ini sebagian besar berdasarkan gejala klinis (suspect).

2. Berdasarkan tabel 5.6. Penyakit yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah penyakit Rabies (RA), Anthrax (AT), Brucellosis (BRUC), Avian Influenza (AI), Hog Cholera (HC), Septichaemia Epizootica (SE), Surra (SA), Helminthiasis (Hel), dll karena masuk dalam 22 jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian 4026 tahun 2013.

Tabel 5. 10 Data Situasi Penyakit Hewan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

No	KABUPATEN/ KOTA	JENIS PENYAKIT (Jumlah Kasus)																	
		AT	SE	SA	RA	STRA	AI	ND	SCAB	HEL	HEL	MCF	BZ	THEL	COCCI	ORF	PE	DC	MYASIS
1	Mataram	-	-	-	-	-	1	-	102	65	18	-	-	-	3	-	1	5	10
2	Lobar	-	-	-	-	-	-	-	46	196	54	-	-	-	-	-	-	-	
3	KLU	-	-	-	-	-	-	-	99	317	104	-	-	10	71	-	12	5	86
4	Loteng	-	3	1	-	-	-	1820	842	2.62	1.593	-	2	12	59	2	167	609	418
5	Lotim	-	-	-	-	-	-	3000	1898	3.677	2.209	-	1	23	394	23	503	859	627
	JUMLAH P. LOMBOK	-	3	1	-	-	1	4820	2,987	6875	3.978	-	-	45	-	25	683	-	1.208
6	KSB	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sumbawa	3	71	13	406	-	-	-	156	244	289	2	57	117	38	8	6	-	55
8	Dompu	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bima	-	53	-	17	1	-	-	735	447	104	4	3	35	-	8	135	11	9
10	Kota Bima	-	-	-	1	-	-	-	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH P.SUMBAWA	4	124	13	426	1	-	-	907	710	394	6	60	152	38	16	141	11	65
	TOTAL NTB	4	127	13	426	1	1	4.82	3.894	7.585	4.372	6	63	197	-	36	824	1.489	1208
	Percentase(%)	0.0002	0.006	0.032	0.118	0.023	0.00004	0.019	0.173	0.338	0.312	0.0004	0.005	0.009	0.025	0.006	0.037	0.066	0.054
																		0.0003	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus Rabies dilaporkan sebanyak 246 kasus (Kab. Sumbawa 406 kasus, Kab. Dompu 2 kasus, Kab. Bima 17 kasus dan Kota Bima 1 kasus), Anthrax 4 kasus (Kabupaten Sumbawa 3 kasus dan Kab. Dompu 1 kasus), SE/Ngorok 127 kasus (Kab. Sumbawa 71 kasus dan Kab. Bima 53 kasus), surra 13 kasus (Kab. Lombok Tengah 1 kasus dan Kab. Sumbawa 12 kasus), AI 1 kasus di Kota Mataram). Demikian halnya dengan Penyakit Helminthiasis (7.585 kasus) terjadi di 9 kabupaten/kota kecuali di Kab. Dompu, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan kasus helmintiasis melalui Ishiknas oleh Kab. Dompu. Penyakit ini tidak bisa dipandang sebelah mata (diremehkan) karena penyakit parasit ini dapat menghambat pertambahan berat badan ternak. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2013, kasus cacingan dapat menghambat pertumbuhan berat badan sebanyak 40% setiap harinya pada sapi potong. Pada pedet yang sudah terinfeksi secara kronis, dapat menyebabkan kematian.

Pemberian obat cacing pada pedet sangat penting, dengan harapan menekan kerugian ekonomi akibat penyakit parasit/cacing serta dapat meningkatkan produksi dan reproduktivitas ternak. Kedepannya diharapkan surveilans parasite cacing dan pengobatan parasite cacing tetap harus mendapat dukungan penuh. Serupa dengan Helminthiasi penyakit Scabiespun merupakan penyakit parasit yang perlu mendapatkan perhatian karena hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB pada tahun 2021 dilaporkan sebanyak 3.894 kasus.

Sedangkan Hasil Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak di UPTD Rumah Sakit Hewan adalah 1.258 ekor yang terdiri dari Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) yang telah di tangani sebanyak 252 ekor dan Penyakit Hewan Non Menular berhasil ditangani adalah sebanyak 1.307ekor. Adapun Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) terdiri dari penyakit scabies sebanyak 110 ekor, penyakit BEF sebanyak 33 ekor, penyakit Demodex sebanyak 25 ekor, penyakit pink eye sebanyak 39 ekor, suspek penyakit Panleukopenia sebanyak 30 ekor, penyakit ektoparasit sebanyak 13 ekor dan Suspek Calici2 ekor. Penyakit Hewan Non Menular terdiri dari penyakit Myasis sebanyak 96 ekor, Penyakit Vulnus sebanyak 63ekor, penyakit Retensiplasenta sebanyak 12 ekor, penyakit Enteritis sebanyak 36 ekor,penyakit PPS sebanyak 48 ekor,penyakit Metritis sebanyak 41 ekor, penyakit Urtikaria sebanyak 2 ekor, penyakit Mal nutrisi sebanyak 7 ekor, Prolapsus ani sebanyak 2 ekor,distokia sebanyak 21 ekor,Pemberian obat cacing sebanyak 671 ekor,vaksinasi sebanyak 79 ekor,kastrasi 60 ekor dan Operasi Ovariohisterektomi sebanyak 15 ekor

3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, terdiri Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit, Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Total pagu kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp.405.668.200 realisasi Rp.151.426.200,- atau (37,33 persen), rendahnya realisasi tersebut karena tertundanya pembayaran kegiatan pembagunan pengelohan sarang burung walet di Lombok Barat, Untuk realisasi fisik bangunan terealisasi 100 persen. dan tidak dilaksanakan Pelatihan Kelompok Pengolahan Sarang Burung Walet di Kabupaten Sumbawa.

Sub kegiatan yang mendukung tercapai output kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan program adalah

- a. Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan merupakan salah satu jaminan untuk penyediaan produk pangan asala hewan yang ASUH. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilaia pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan . Tujuan sertifikasi NKV adalah : Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asala hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah, Mendukung terwujudnya ketenteraman batin masyarakat dan Meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan Indonesia di pasar Internasional.

Tabel 5. 11 Unit Usaha yang telah memiliki NKV Tahun 2021

No.	Nama Unit Usaha	Kab/Kota	Nomor NKV	Tanggal Terbit
1	CV. Ading Walet Al. Buntaran	Lombok Tengah	UCSBW 520205-001	22 april 2021
2	PT. Mitra Nasional Kualitas	Lombok Barat	CS-520114-003	28 september 2021
3	PT. Samawa Gemilang Perkasa	Sumbawa	BUP-520410-001	11 november 2021
4	CV.Anggung Raya Lestari	Sumbawa	CS-520422-002	17 november 2021
5	CV.88 Aurora	Lombok Tengah	CS-520202-002	

- b. Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan terdiri dari : Melakukan Koordinasi /Sosialisasi dengan Dinas Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa tentang kegiatan Pembuatan bangunan Sarana Prasarana Burung wallet dikabupaten Lombok Barat dan Hibah Uang untuk Bimtek pencucian sarang burung wallet di Kampung wallet Kabupaten Sumbawa, Kelompok Penerima bantuan bangunan sarana dan prasarana wallet ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB Nomor : KU.188.3/5541/Disnakwan/XI/2021, Tanggal 23 November 2021, sedangkan untuk kelompok penerima bantuan hibah uang

ditetapkan melalui SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 900-824 TAHUN 2021, tanggal 31 Desember 2021

c. Sedangkan sub kegiatan pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan hewan veteriner, sub kegiatan ini untuk menguji secara laboratorium terhadap sampel ternak dan produk peternakan yang dihasilkan. Ternak dan Produk yang dihasilkan harus bersstandar ASUH. Tahun 2021 melalui pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel ternak. telah dilaksanakan :

- (1) pemeriksaan PUD sebanyak 227 sampel dengan hasil Negatif Surra, sebanyak 72 sampel, Negatif antrak 59 sampel, negative anaplasmosis sp sebanyak 32 sampel, Negatif babesiosis sp 32 sampel, Negatif theleriosis sp sebanyak 32 sampel.
- (2) pemeriksaan Serum dengan rincian : 2.202 sampel yang terdiri , 21 sampel serum ayam pada pengujian ND, 21 sampel serum ayam pada pengujian Al, 2.160 sampel serum ayam pada pengujian pullorum dan 1.176 serum sapi Negatif Brucellosis.
- (3) parasit internal sebanyak 172 sampel feces.
- (4) Pemeriksaan residu antibiotika pada daging sapi sebanyak 26 sampel, daging ayam sebanyak 47 sampel, daging Kerbau sebanyak 28 sampel, hati ayam sebanyak 10 sampel dan telur ayam sebanyak 40 sampel. Hasil pengujian Residu antibiotika golongan antibiotika makrolida (ML), aminoglikosida (AG), tetrasiklin (TC).
- (5) Selain itu juga dilakukan pemeriksaan TPC sebanyak 108 sampel daging ayam dengan hasil 47 (55.5%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 61 (44.4%) sampel melebihi BMCM, 128, sampel daging Sapi dengan hasil 17 (33.3%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 111(66,7%) sampel melebihi BMCM, 55, sampel telur segar dengan hasil 55 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba), dan 0 (0%) sampel melebihi BMCM, 31 sampel daging Kerbau dengan hasil 27 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 4 (44.4%) sampel melebihi BMCM, 10 dan sampel susu kambing dengan hasil 7 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba), dan 3 (44.4%) sampel melebihi BMCM.

(6) Melakukan pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berupa : (a) Pemeriksaan Pullorum di PT Charoen Pokphand di Lombok Timur sebanyak 2.160 ekor ayam (b) Pengujian sampel dari Kabupaten Lombok Barat berupa sampel serum RBT Brucellosis sebanyak 70 sampel, hasil pengujian serum Brusellosis metode uji RBT 50 Negatif RBT, ELISA Antraks 10 sampel hasil pengujian Positif Serum Elisa Anthrak 6 hasil pengujian Negatif Serum Elisa Anthrak 4 sampel, dan SE 10 sampel sampel hasil pengujian Positif Serum Elisa SE 9, negative 1 sampel. (c) Pemeriksaan RBT Brucellosis sapi bibit lokal sebanyak : Sapi sebanyak 1.176 ekor. (d) Pengujian Sampel dari bidang keswan berupa sampel serum uji Elisa Antrak sebanyak 300 dengan hasil pengujian positif 177 sampel, negative 123 sampel. (e) Pengujian Sampel Elisa Antrak dari bidang keswan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa sebanyak 250 sampel dengan hasil pengujian 156 sampel sero positif antrak dan 94 sampel sero negative antrak. Dan (f) Pemeriksaan TPC bidang kesmavet sebanyak 128 daging sapi, 31 Daging Kerbau, 108 daging ayam, 55 telur segar , 10 susu kambing segar , pemeriksaan E. Coli dan Coliform sebanyak 54 sampel daging sapi, 42 sampel daging kerbau, 70 sampel daging ayam 50 sampel telur segar, pemeriksaan residu antibiotika bidang kesmavet sebanyak 5 sampel daging sapi, 14 sampel daging kerbau, 16 sampel daging ayam. Pemeriksaan TPC Lombok Barat sebanyak 40 sampel daging sapi, 40 sampel daging ayam, Pemeriksaan E. Coli Lombok barat sebanyak 20 sampel telur ayam dan 23 sampel telur bebek. Pemeriksaan awal pembusukan sebanyak 20 sampel daging Ayam.

d. Kesejahteraan Hewan

Output yang diharapkan dari kegiatan kesejahteraan hewan adalah terkendalinya pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebesar 1 persen dari total betina yang dipotong di RPH/TPH.

Berdasarkan Tabel 5.12 bahwa Pemotongan Sapi dan Kerbau Tahun 2021 sebanyak 64.400 Ekor, terdiri dari ternak jantan sebanyak 59.084 ekor dan ternak betina sebanyak 5.3164 ekor. Dari jumlah ternak betina yang dipotong tahun 2021

sebanyak 4.063 Ekor terdiri dari ternak sapi sebanyak 4.063 ekor dan kerbau sebanyak 1.253 Ekor, dari jumlah betina yang dipotong, betina produktif yang dipotong sebanyak 10 Ekor terdiri dari ternak sapi sebanyak 10 ekor atau 0,19 persen dari betina yang dipotong. Untuk lebih rinci dapat disajikan pada tabel 8.8. Sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp. 25.717.000,- atau sebesar 99,89 persen dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.748.800.

Tabel 5.12 Data Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau dan Ternak Lainnya di Provinsi NTB Tahun 2021

REKAPITULASI PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JANUARI S/D DESEMBER 2021																				
NO	KABUPATEN/KOTA	JLH RPH/TPH			JUMLAH PEMOTONGAN						JLH SAPI & KRB	BETINA PRODUKTIF YANG DIPOTONG			% BTN PRODUKTIF TERHADAP		ALASAN BETINA DITOLAK UNTUK DIPOTONG			
		RPH	TPH	JLH	SAPI			KERBAU				SAPI	KERBAU	JUMLAH	Yg di Potong %	BTN yg dipotong %	Umur Produktif ekor	Bunting ekor	Lain-lain ekor	
					JTN	BTN	JLH	JTN	BTN	JLH										
1	RPH BANYUMULEK (RPH PROV.)	1	-	1	31	-	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATARAM	2	-	2	11,150	21	11,171	15	-	15	11,186	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	LOMBOK BARAT	4	3	7	3,891	-	3,891	6	-	6	3,897	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	LOMBOK UTARA	1	2	3	1,790	21	1,811	-	-	-	1,811	-	-	-	-	-	4	6	-	
5	LOMBOK TENGAH	4	9	13	7,984	127	8,111	1,752	2	1,754	9,865	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	LOMBOK TIMUR	6	16	22	19,584	45	19,629	161	-	161	19,790	1	-	1	0.01	2.22	-	-	-	
<i>Jumlah P. Lombok:</i>		18	30	48	44,430	214	44,644	1,934	2	1,936	46,580	1	-	1	0.00	0.46	4	6	-	
7	SUMBAWA	7	5	12	3,539	2,261	5,800	672	919	1,591	7,391	3	-	3	0.04	0.09	-	-	-	
8	SUMBAWA BARAT	4	-	4	1,248	1,387	2,635	284	302	586	3,221	6	-	6	0.19	0.36	45	42	-	
9	DOMPU	2	1	3	1,217	72	1,289	166	19	185	1,474	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	KOTA BIMA	1	1	2	2,227	27	2,254	1	-	1	2,255	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KAB. BIMA	3	1	4	3,242	102	3,344	124	11	135	3,479	-	-	-	0.00	-	10	12	-	
<i>Jumlah P. Sumbawa:</i>		17	8	25	11,473	3,849	15,322	1,247	1,251	2,498	17,820	9	-	9	0.05	0.18	55	54	-	
JUMLAH NTB:		35	38	73	55,903	4,063	59,966	3,181	1,253	4,434	64,400	10	-	10	0.02	0.19	59	60	-	

REKAPITULASI PEMOTONGAN TERNAK LAINNYA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JANUARI S/D DESEMBER 2021																	
NO	KEC/RPH/TPH	JENIS TERNAK														KET	
		KUDA			KAMBING			DOMBA			UNGgas/AYAM			BABi			
		Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	
1	Kota Mataram:	4	-	4	1,143	8	1,151	47	-	47	14,841	11,000	25,841	1,034	726	1,760	
2	Lombok Barat	-	-	-	2,219	-	2,219	-	-	-	158,585	-	158,585	-	-	-	
3	Lombok Utara	-	-	-	490	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Lombok Tengah	448	4	452	10,026	3,054	13,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Lombok Timur	-	-	-	1,259	-	1,259	20	-	20	-	-	-	-	-	-	
<i>Jlh. Pulau Lombok :</i>		452	4	456	15,137	3,062	18,199	67	-	67	173,426	11,000	184,426	1,034	726	1,760	
6	Sumbawa	22	16	38	860	-	860	22	-	22	-	-	-	-	-	-	
7	KSB	-	-	-	381	58	439	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
8	Dompu	14	-	14	431	-	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Bima	-	-	-	1,853	-	1,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Bima	124	18	142	1,406	-	1,406	33	-	33	-	-	-	-	-	-	
<i>Jlh. Pulau Sumbawa:</i>		160	34	194	4,931	58	4,989	61	-	61	-	-	-	-	-	-	
Jumlah NTB:		612	38	650	20,068	3,120	23,188	128	-	128	173,426	11,000	184,426	1,034	726	1,760	

e. Program Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tahun Anggaran 2021 Program Penyuluhan Pertanian teralokasi pagu Rp. 66.313.400,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 57.740.00,- atau sebesar (95,19 persen). Sasaran yang dicapai dalam program ini adalah terbentuknya dan terbina kelembagaan kelompok tani berbasis korporasi dan terlaksananya informasi pemasaran produk peternakan. Tahun 2021 Jumlah Korporasi yang sudah terbentuk adalah sebanyak 2 Korporasi yaitu Korporasi KTT Ridho Ilahi di Kecamatan Wanasabah Kabupaten Lombo Timur dan Korporasi Mandalika bareng sampi di Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dengan sub kegiatan Diseminasi informasi teknis, social, ekonomi dan inovasi pertanian tahun anggaran 2021 semula pagu murni DPA sebesar Rp. 250.920.600,- menjadi 57.410.600,-, karena adanya rasionalisasi anggaran, Realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 49.265.600, atau (85,81 persen). Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dukungan anggaran seperti kegiatan pertemuan untuk bazaar/expo, pengadaan bahan cetak pendukung pameran dan expo dimana target dalam DPA adalah 10 paket produk peternakan yang dipamerkan. Namun demikian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dapat mengikuti kegiatan pameran dalam rangka HUT NTB dengan menampilkan produk hasil peternakan seperti produk olahan abon , kerupuk kulit, telur asin, olahan sarang burung wallet dan lain-lainnya produk hasil olahan UMKM. Kegiatan pemasaran lain yang diikuti tanpa biaya adalah kegiatan pasar lelang yang menjadi leading adalah Dinas Perdagangan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengikutsertakan kalangan wirausaha di sektor peternakan seperti olahan ayam beku dan sarang burung wallet, dan terjadi transaksi perdagangan di pasar lelang dengan pihak pembeli dari Kalimantan Timur sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Realisasi lainnya adalah dari Belanja jasa yaitu Petugas Informasi Pasar yang bertugas menginput dan mengumpulkan data harga ternak dan hasil ternak dari seluruh kabupaten/kota se NTB secara harian melalui aplikasi SIMPONI ternak. Data dimaksud seperti data ternak sapi dalam bentuk berat hidup , harga telur (kg), harga ayam hidup (kg) baik di tingkat produsen maupun konsumen. Realisasi lainnya adalah melalui

perjalanan dinas biasa yang digunakan untuk melakukan monitoring ke pasar ternak di kabupaten Lombok Timur dan identifikasi lokasi pengembangan produk ekspor sarang burung wallet di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat.

Fungsi lainnya yang dilakukan oleh seksi Tata Niaga adalah memberikan pelayanan untuk menerbitkan Sertifikat Perusahaan Peternakan (SP3) dan Rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak anatar kabupaten di wilayah NTB maupun antar provinsi berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman pemasukan dan pengeluaran ternak di NTB. Sepanjang tahun 2021 jumlah SP3 yang diterbitkan adalah sebanyak 112 SP3 baik pengajuan baru maupun perpanjangan sedangkan data rekomendasi yang dikeluarkan didasarkan pada kuota pengeluaran ternak baik ternak potong maupun bibit dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 524 – 195 tahun 2021 tentang Kuota Pengeluaran ternak sapi dan kerbau dalam daerah dan keluar daerah dengan rincian kuota pengeluaran untuk ternak sapi pootng di dalam daerah adalah sebanyak 44.000 ekor yang terdistribusi ke kab kota di pulau Lombok dan 15.000 ekor ternak sapi potong yang dikeluarkan dari NTB untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain seperti JABODETABEK dan beberapa provinsi lain, kuota kerbau potong sebanyak 3.450 ekor, sementara untuk ternak bibit kuota yang ditetapkan adalah sebanyak 10.000 ekor untuk keluar daerah.

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yakni sub kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani,pendampingan manajemen korporasi dan penilaian kelayakan standarisasi manajemen korporasi petani. Pagu tahun 2021 sebesar Rp. 8.902.800,-. Kegiatan ini sampai dengan desember 2021, tidak dapat direalisasikan karena tidak tersedianya SPD pada sub kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap kelembagaan korporasi yang telah terbentuk yakni di korporasi KTT Ridho ilahi telah dilakukan Pertemuan Unit manajemen kawasan korporasi/UMKM dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 30 orang dilaksanakan pada tanggal 20 April 202, dan Pertemuan Unit Manajemen Kawasan Korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 50 orang. Data korporasi 5 Desa 1000 Desa Sapi di Kecamatan Pujut Lombok Tengah Tahun 2021 (Korporasi Mandalika Baren Sampi). Kegiatan ini di dukung dari dana APBN Tahun 2021.

5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan

Tabel 5. 13 Pagu dan Realisasi Capaian Kinerja Program Unggulan Tahun 2021

No.	Program Prioritas/Program Unggulan Provinsi NTB	Uraian kegiatan / Major Project	Indikator kinerja	Target kinerja	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi		% Realisasi		Lokasi (Kab/Kota)	Permasalahan/ Kendala	Keterangan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
1		3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)*100	10 = (8/6)*100	6	12	13
		Dukungan dari APBD			42,532,787,500	100	41,539,823,400	100	97.67			
1	KAMPUNG UNGGAS	APBD:			27,111,800,000	100	26,807,565,000	100	98.88			
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
		3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										
		3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										
		- Pembangunan Kandang unggas	Peningkatan Populasi Ternak (ekor)	10 Unit	1,141,500,000	10	1,138,700,000	100	99.75	Lobar 4, KLU 1, Loteng 3, Lotim 1 dan KSB 1		
		- Pengadaan Ternak Ayam, Pakan dan Kandang	Peningkatan Populasi Ternak (ekor)	109 Kelompok	22,175,500,000	109	21,890,485,000	100	98.71	Mataram 4; Lobar 16; Loteng 19 ; Lotim 31, KLU 3; KSB 6 ; Sumbawa 22; Dompu 2; Bima 2; Kota Bima 4		
		- Pengadaan Ternak Ayam	Peningkatan Populasi Ternak (ekor)	35 Kelompok	1,652,550,000	35	1,637,130,000	100	99.07	Lobar 5; Loteng 14 ; Lotim 11; KLU 1; Sumbawa 3 ;Kota Bima 1		
		- Pengembangan/ Pengadaan Ternak Itik	Peningkatan Populasi Ternak (ekor)	110 Kelompok	2,142,250,000	110	2,141,250,000	100	99.95	Lotim71; Loteng 20; Lobar 18		
2	INDUSTRI PETERNAKAN/	APBD:			14,522,573,000	100	13,927,198,900	100	95.90			
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
		3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										
		3.27.02.1.07.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										
		- Pengembangan Kawasan Pakan Ternak	Penyedian HPT (Ha)	7 Kelompok	197,500,000	7	197,400,000	100	99.95	Lombok Tengah		
		3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										
		- Pengadaan Ternak Sapi	Peningkatan populasi ternak (ekor)	89 Kelompok	9,836,900,000	89	9,390,025,900	100	95.46	Mataram 1; Lobar 7; Loteng 27 ; Lotim 29, KLU 1; KSB 7 ; Sumbawa 12; Dompu 2 ; Bima 2; Kota Bima 1		
		- Pembangunan Kandang Sapi	Peningkatan populasi ternak (ekor)	4 Unit	712,500,000	4	712,500,000	100	100.00	Lobar 3, dan Lotim 1		
		- Pengadaan kambing	Peningkatan populasi ternak (ekor)	17 kelompok	677,673,000	17	704,373,000	100	103.94	Loteng 4; Lobar 4; Loteng 2; Lotim 5; KSB 1;Dompu 1 ; Bima 3; Kota Bima 1		
		- Pengadaan Pakan	Peningkatan populasi ternak (ekor)	1 Kelompok	47,500,000	1	47,500,000	100	100.00	Lombok Timur		
		- Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan	Peningkatan populasi ternak (ekor)	1 Kelompok	23,500,000	1	23,000,000	100	97.87	Sumbawa		
		- Pengadaan Sarana Pengolahan Abon	Peningkatan Nilai Tambah (NTP)	1 Kelompok	20,000,000	1	19,900,000	100	99.50	Sumbawa		
		- Bantuan Hibah Uang Untuk Pengembangan Ternak	Peningkatan populasi ternak (ekor)	97 kelompok	3,007,000,000	97	2,832,500,000	100	94.20	Mataram; Lobar; Loteng; Lotim; KLU; KSB; Sumbawa; Dompu; Bima; Kota Bima	7 kelompok tidak terrealisasi karena kekurangan lengkap administrasi	

3	BELA BELI PRODUK LOKAL	APBD :				898,414,500	100	805,059,500	100	89.61			
	BELA BELI PRODUK LOKAL	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
		3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Sepeda Listrik tipe Ngebut/ Tipe Khusus Lainnya	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Listrik) (Unit)	3 Unit	63,555,000	3	-	100	-	Kota Mataram	Tunda Bayar tahun 2022		
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
		3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain											
		3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain											
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	100,000 Straw	834,859,500	72,943	805,059,500	73	96.43	10 Kab/Kota	Sapi Bull penghasil semen, umur rata diatas 8 tahun, sehingga produksi semen sudah berkurang	UPTD BIB	
		Dukungan dari APBN atau sumber lain:			1,755,635,000	100	1,751,196,500	100	99.75				
	INDUSTRI PAKAN TERNAK	APBN :			1,755,635,000	100	1,751,196,500	100	99.75				
	INDUSTRI PAKAN TERNAK	018.06.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
		1783. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak											
		1783.QEG.001 Hijauan Pakan Ternak (Pengembangan Unit Pengolah Pakan Sapi Potong)	Peningkatan Produksi Daging	2 Unit	720,000,000	2	718,600,000	100	99.81	Kab. Bima dan Kota Bima			
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
		Pembinaan dan Pendampingan Biaya	Peningkatan Nilai Investasi	30 Orang	40,000,000	30	39,545,000	100	98.86	10 Kab/Kota			
		Pembinaan dan Pendampingan Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	30 Orang	33,780,000	30	33,780,000	100	100.00	10 Kab/Kota			
		Identifikasi potensi produksi dan pelaku usaha eksport peternakan	Peningkatan Nilai Investasi	30 Orang	44,000,000	30	43620000	100	99.14	10 Kab/Kota			
		Koordinasi pemanfaatan kapal ternak	Peningkatan Nilai Investasi	40 Orang	58,310,000	40	58,060,000	100	99.57	10 Kab/Kota			
		Pembinaan/pendampingan peningkatan mutu produksi olahan peternakan	Peningkatan Nilai Investasi	40 Orang	88,000,000	40	87,495,000	100	99.43	10 Kab/Kota			
		Pembinaan/Pendampingan usaha peternakan dan kemitraan	Peningkatan Nilai Investasi	150 Orang	166,545,000	150	166,470,000	100	99.95	10 Kab/Kota			
		Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Peningkatan Nilai Investasi	2 Unit	205,000,000	2	203,981,500	100	99.50	Kab.Loteng dan Lotim			
		Peningkatan Produksi Pakan Ternak											
		Hijauan Pakan Ternak (Pengembangan Hijauan Pakan Sapi Potong)	Peningkatan Produksi Daging	1 unit	400,000,000	1	399,645,000	100	99.91	Bima			

Tahun 2021 Program Unggulan pada OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yaitu pada program Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri yaitu pada program Kampung Unggas dan Industri Pakan Ternak. Tahun 2021 Total Pagu yang mendukung program unggulan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah sebesar Rp.42.532.787.500,- Dan dapat teralisis sebesar Rp. 41.539.823.400 Atau sebesar (97,67 Persen). Adapun rincinan kegiatan yang mendukung program unggulan Tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

5.5. Permasalahan Dan Kendala

Dalam pelaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2021 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pelaksana diantaranya:

- a. Adanya refocusing anggaran sehingga proses revisi DPA berdampak terhadap penundaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. Proses realisasi anggaran dibatasi oleh ketersediaan dana, sehingga masih banyak kegiatan yang sudah teralisasi fisiknya tapi tidak teralisasi keuangannya.
- c. Pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat dilaksanakan diakhir tahun, sehingga bantuan kepada masyarakat belum bisa di ukur dampak keberhasilan pada tahun 2021.
- d. Dukungan terhadap kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, seperti penyakit Rabies masih minim, sehingga kasus gigitan hewan menular rabies pada manusia masih terjadi.
- e. Tidak tersedianya operasional petugas Pendataan Populasi Ternak di tingkat desa/kecamatan/Kabupaten/Kota, sehingga data yang disajikan masih belum begitu akurat, dan perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang.
- f. Kualitas ternak belum optimal karena penggunaan pejantan kurang selektif/belum diupayakan secara khusus tersedianya pejantan unggul dan pemilihan bibit sapi betina untuk induk juga belum efektif.
- g. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak
- h. Pemanfaatan lahan (padang pengembalaan, lahan tegal, ladang, dll) sebagai sumber pakan ternak belum optimal
- i. Pemanfaatan limbah dan hasil sisa pertanian tanaman pangan (Jerami dan jagung) belum optimal, sehingga ketersediaan pakan belum kontinyu sepanjang tahun (melimpah ketika musim hujan dan kekurangan di musim kemarau).
- j. Masih tingginya harga pakan ternak unggas dan masih rendanya kemampuan pengolahan dan penyediaan pakan ternak unggas secara mandiri oleh peternak
- k. Terbatasnya kemampuan dan kapasitas peternak lokal khusunya ternak unggas dalam memenuhi kebutuhan telur dalam daerah
- l. Usaha peternakan (Ternak Ruminansia dan Unggas) masih dilakukan secara tradisional, belum menggunakan prinsip bisnis dan IPTEK dan belum memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ternak.
- m. Kelompok tani ternak belum berfungsi optimal, masih bersifat formalitas (membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah).
- n. Minim anggaran penanggulangan dan pemberantasan PHMS Sehingga menyebabkan caveragenya di bawah standard.

- o. Masih tingginya kejadian penyakit gangguan reproduksi pada ternak ruminasia (Sapi dan Kerbau) yang tidak tertangani, karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
- p. Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif akibat fungsi pengendalian belum berjalan optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ternak betina produktif dalam menjaga populasi.
- q. Pengawasan Lalu lintas produk pangan asal ternak (daging dan telur) masih rendah. Belum adanya pos terpadu/check point di pintu masuk pelabuhan sehingga pengawasan lalin PAH tidak berjalan optimal.
- r. Belum optimalnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan.
- s. Masih minimnya Unit Usaha Prociuk Pangan Asal Hewan dan kelompok Usaha Prociuk Hasil Peternakan yang memiliki sertifikat NKV dan sertifikat ijin usaha lainnya.
- t. Ketersediaan sumberdaya yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi sangat terbatas.
- u. Sistem pendampingan kelompok tani ternak masih belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- v. Sarana dan prasarana pelayanan usaha ternak seperti RPH/ TPH, Puskeswan, Pos 18 dan Penyuluhan Peternakan belum optimal.
- w. Belum tertatanya kelembagaan ekonomi peternak berbasis korporasi. Rata2 usaha peternak merupakan usaha mikro.
- x. Rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan dan asuransi.
- y. Belum terintegrasi kegiatan dari hulu sampai hilir untuk produk peternakan yg dihasilkan yg menyebabkan nilai tambah belum optimal.
- z. Pengembangan investasi dan kemitraan rendah.

5.6. Saran Dan Tindak Lanjut

- a. Pelaksanaan program/kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kas yang telah dibuat, sehingga realisasi kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun.
- b. Pelaksanaan bantuan ke pada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dilaksanakan sesuai rencana kas yang telah ditentukan, sehingga diharapkan secara administrasi dapat dipersiapkan lebih awal, dan pengadaan barang/jasa proses dipercepat.
- c. Dukungan Dana Pengendalian dan pemberantasan Rabies, tidak saja berasal dari APBN tapi juga dialokasikan melalui APBD Provinsi dan APBD kabupaten/Kota.

- d. Untuk biaya operasional petugas pendataan populasi ternak akan diusulkan melalui standar harga.
- e. Dalam meningkatkan SDM petugas diperlukan pelatihan/ bimbingan teknis.
- f. Mengembangkan industry pakan ternak, untuk memenuhi kebutuhan peternak, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.
- g. Mengembangkan padang pengembalan sebagai lahan pengembangan pakan ternak
- h. Memperketat pengawasan terhadap lalulintas ternak dan produk hasil peternakan yang keluar masuk dari luar daerah provinsi maupun antar kabupaten/kota, sehingga dapat mneghindari dari penyebaran penyakit maupun dapat mengontrol peredaran produk peternakan yang sesuai standar.
- i. Memperkuat kelembagaan kelompok dengan melakukan pendampingan, bimtek dan kelompok diharapkan berkembang menjadi kelompok yang ber korporasi.
- j. Revitalisasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan dan menawarkan ke pihak investor untuk dimanfaatkan.
- k. Melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat dari perbankan dan lembaga-lembaga perbankan lainnya.

BAB VI

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum), Sosial, Perumahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, bukan merupakan OPD yang melaksanakan fungsi standar pelayanan minimum, karena usuran pemerintahan yang dilaksanakan hanyalah urusan pilihan, sehingga tidak tersedia target pelaksanaan standar pelayanan minimum.

BAB VII

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021, teralokasi kegiatan yang pembiayaan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT), dimana penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT.

Tabel 7. 1 Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBH-CHT Tahun 2021 Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

No	Uraian Program / Kegiatan	Uraian Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi		Output			
			Rp.	Rp.	%	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
	Kegiatan :Penyediaan benih / bibit ternak daan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat							
	Benih / Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	PENGEMBANGAN TERNAK SAPI	2,380,000,000	2,230,180,900	93.71				
		1 KELompok TANI GONG MAS, DESA PANDAN INDAH KEC. PRAYA BARAT DAYA KAB. LOTENG	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		2 KELompok TANI TERNAK INSANI TAZKIA, DESA DANGER KEC. MASBAGIK KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		3 KELompok TERNAK SAPI AL-IKHLAS, DESA BELANTING KEC. SAMBALIK KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		4 KELompok TANI TERNAK PERMATA RAKAM, KELURAHAN RAKAM KEC. SELONG KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		5 KELompok TERNAK TANDUR BARENG, DESA BOROK TOYANG KEC. SAKRA BARAT KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		6 KELompok TANI TERNAK SAPI TULUS ANGEN, DESA LEPAK KEC. SAKRA TIMUR KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		7 KELompok TANI TERNAK SURYA HARAPAN III, KELURAHAN SEKARTAJA KEC. SELONG KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		8 KELompok TERNAK ARUM JAYA, DESA SELEBUNG KETANGGA KEC. KERUAK KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		9 KELompok TERNAK DHARMA BAKTI, DESA DASAN BOROK KEC. SURALAGA KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		10 KELompok TERNAK HARAPAN, DESA REMBITAN KEC. PUJUT KAB. LOTENG	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		11 KELompok TERNAK KADUK FARM, DESA PENGADANGAN KEC. PRINGGASELA KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		12 KELompok TERNAK LM3 RAUDATUL MUJAHIDIN, DESA KUMBANG KEC. MASBAGIK KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		13 KELompok TERNAK MAJU LESTARI, DESA TEMBENG PUTIK KEC. WANASABA KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		14 KELompok TERNAK MALIK NGARET, DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR LOTENG NTB	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		15 KELompok TERNAK MIFTAHUL RIZKI, DESA DASAN LEKONG KEC. SUKAMULIA KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		16 KELompok TERNAK NAFAS JUANG, DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		17 KELompok TERNAK ORONG BANDE, DESA KETANGGA KEC. SUELA KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		18 KELompok TERNAK PADE GIRANG, DESA KEMBANG KUNING KEC. SIKUR KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		19 KELompok TERNAK PENGEMBUR BERSATU, DESA PRINGGAJURANG KECAMATAN MONTONG GADING KAB. LOTIM	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		20 KELompok TERNAK PERSATUAN ABADI, DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KAB. LOTENG	100,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		21 KELompok TANI TERNAK MAWAR, DESA SELEBUNG REMBIGA, KEC. JANAPRIA, KAB. LOTENG	190,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		22 KELompok TANI TERNAK SAKURA, DESA SABA KEC. JANAPRIA KAB. LOTENG	190,000,000	-		Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING	150,000,000	148,700,000	99.13				
		1 KELompok TERNAK AL-IKHLAS, DESA PERIGI KEC. SUELA KAB. LOTIM	100,000,000	99,200,000	99.20	Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		2 KELompok TERNAK TIMBA MAYANG, DESA PERIGI KEC. SUELA KAB. LOTIM	50,000,000	49,500,000	99.00	Paket	1 Kelompok	1 Kelompok	100
		TOTAL	2,530,000,000	2,378,880,900	94.03		024 Kelompok	24 Kelompok	100

Tahun 2021 alokasi anggaran DBH CHT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.378.880.900,- (94,03 Persen), untuk realisasi fisik kegiatan dapat tercapai 100 persen. Kegiatan dana DBCHT ini diperuntukan untuk Pengadaan Ternak Sapi dan ternak kambing yaitu sebanyak 24 Kelompok di Kabupaten Lombok Timur 18 Kelompok penerima dan di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 6 Kelompok penerima.

Jumlah ternak sapi yang didistribusi pada 22 kelompok penerima adalah sebanyak 186 ekor sapi betina, sedangkan pada kelompok kambing didistribusikan sebanyak 3 ekor kambing jantan dan 39 ekor kambing betina pada 2 kelompok sasaran penerima.

BAB VIII

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

8.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada Tahun 2021 berdasarkan DIPA Nomor : SP-DIPA-018.06.4.239129/2021 tanggal 23 November 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.185.746.000.

8.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2021 mendapat alokasi pembiayaan melalui Dana APBN. Anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kementerian/lembaga pemberi tugas pembantuan yang tertera dalam DIPA masing-masing kementerian/lembaga. Berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga yang

dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Satuan kerja 239129), teralokasi pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp19.185.746.000,-:

Berdasarkan DIPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Satker 239129), terdapat 4 Program dan 6 kegiatan sebagai berikut, yaitu :

Tabel 8. 1 Daftar Pagu Satker (239129) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		KET
		KEUANGAN	OUTPUT	
1	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	815,982,000	-	
	a Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	815,982,000	1 Lembaga	
	- <i>Fasilitasi dan pembinaan lembaga</i>	435,982,000	1 Lembaga	
	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan eksport	435,982,000	1 Lembaga	
	- Pembinaan dan Pendampingan Pembiayaan	40,000,000	-	
	- Pembinaan dan Pendampingan Investasi	33,780,000	-	
	- Identifikasi Potensi Produk dan Pelaku Usaha Eksport Peternakan	44,000,000	-	
	- Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak	58,310,000	-	
	- Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	88,000,000	-	
	a. <i>Pembinaan/ pendampingan pengolahan hasil peternakan</i>	44,000,000	-	
	c. <i>Pemutahiran data base pengolahan</i>	44,000,000	-	
	- Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan	166,545,000	-	
	a. <i>Pembinaan dan pendampingan kemitraan</i>	18,210,000	-	
	b. <i>Pemberdayaan agribisnis peternakan</i>	3,270,000	-	
	g. <i>korporasi Lombok Tengah</i>	83,580,000	-	
	h. <i>korporasi Lombok Timur</i>	61,485,000	-	
	- Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan	5,347,000	-	
	- <i>Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</i>	205,000,000	2 Unit	
	- Sarana dan sertifikasi organik produk pangan asal ternak	130,000,000	1 Unit	
	- Sarana pasar ternak	75,000,000	1 Unit	
	- <i>Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</i>	175,000,000	2 Unit	
	- Prasarana dan sertifikasi organik produk pangan asal ternak	50,000,000	1 Unit	
	- Prasarana pasar ternak	125,000,000	1 Unit	
2	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	18,068,191,000	-	
	a Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1,150,000,000	-	
	- <i>Bantuan Peralatan/Sarana</i>	1,120,000,000	2 Unit	
	Hijauan Pakan Ternak	400,000,000	1 Unit	
	Pakan Olahan dan Bahan Pakan	720,000,000	2 Unit	
	- <i>Penyidikan dan Pengujian Produk</i>	30,000,000	15 Produk	
	Mutu dan Keamanan Pakan	30,000,000	15 Produk	
	- Pengawasan mutu dan keamanan pakan sapi potong	20,000,000	15 Produk	
	- Pengawasan mutu dan keamanan pakan ayam ras pedaging	10,000,000	10 Produk	
	b Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	387,500,000		
	- <i>Pelayanan Publik Lainnya</i>	387,500,000	4 Layanan	
	Pelayanan Kesehatan Hewan	387,500,000	4 Layanan	
	- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies	219,155,000	2,000 Dosis	
	- Fasilitasi Puskeswan	58,630,000	3 Unit	
	- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan anthrax	109,715,000	10,000 Dosis	

c Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	16,105,991,000	124,553	Kelompok Masyarakat	
- <i>Bantuan Kelompok Masyarakat</i>	16,105,991,000	124,553	Kelompok Masyarakat	
Optimalisasi Reproduksi	11,697,281,000	124,540	Kelompok Masyarakat	
- Fasilitasi alat dan bahan IB	1,719,200,000			
- Pengadaan N2 Cair	1,448,850,000	75,000	Liter	
- Operasional IB	3,445,650,000	101,855	Akseptor	
- Operasional Kebuntingan	2,149,920,000	59,664	Ekor	
- Operasional Kelahiran	1,711,796,000	71,543	Ekor	
- Honor Recorder	116,804,000	170	OB	
- <i>Ternak Ruminasia Perah</i>	356,210,000	1	Kelompok Masyarakat	
Sapi Perah	356,210,000	12	Ekor	
- <i>Ternak Ruminasia Potong</i>	4,052,500,000	5	Kelompok Masyarakat	
Sapi Potong	4,052,500,000	256	Ekor	
d Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	424,700,000	-		
- <i>Sertifikasi Lembaga</i>	346,657,000	1	Lembaga	
Sertifikasi Unit Usaha	346,657,000	1	Lembaga	
Masyarakat yang tereduksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	50,293,000	50	Orang	
- Komunikasi, informasi dan edukasi zoonosis	30,000,000	50	Orang	
- Penerapan kesejahteraan hewan	20,293,000	-		
- <i>Penyidikan dan Pengujian Produk</i>	27,750,000	50	Produk	
Mutu dan Keamanan Produk Hewan	27,750,000	50	Produk	
		-		
3 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	301,573,000	3	Layanan	
a Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknislainnya Ditjen Peternakan	301,573,000	3	Layanan	
- <i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</i>	256,986,000	1	Layanan	
- <i>Layanan Data dan Informasi</i>	26,593,000	1	Layanan	
- <i>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</i>	17,994,000	1	Layanan	
		-		
TOTAL PAGU DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN NTB	19,185,746,000	-		

8.3. Capain Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam DIPA Tugas Pembantuan Satuan kerja (06) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 6 (enam) kinerja fungsi yaitu : (1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; (3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular; (4) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak; (5) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Capaian kinerja masing-masing fungsi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 8. 2 Pagu dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		REALISASI				SISA PAGU	KET	
		KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	%			
1	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	815,982,000	-	813,298,500	99.67	-	100.00	2,683,500		
a	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	815,982,000	1 Lembaga	813,298,500	99.67	1	100.00	2,683,500		
-	Fasilitasi dan pembinaan lembaga	435,982,000	1 Lembaga	434,317,000	99.62	1	100.00	1,665,000		
	Lembaganya terdaksa akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan eksport	435,982,000	1 Lembaga	434,317,000	99.62	1	100.00	1,665,000		
	- Pembinaan dan Pendampingan Pembiayaan	40,000,000	-	39,545,000	98.86	-	-	455,000		
	- Pembinaan dan Pendampingan Investasi	33,780,000	-	33,780,000	100.00	-	-	-		
	- Identifikasi Potensi Produk dan Pelaku Usaha Eksport Peternakan	44,000,000	-	43,620,000	99.14	-	-	380,000		
	- Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak	58,310,000	-	58,060,000	99.57	-	-	250,000		
	- Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	88,000,000	-	87,495,000	99.43	-	-	505,000		
	a. Pembinaan/ pendampingan pengolahan hasil peternakan	44,000,000	-	43,595,000	99.08	-	-	405,000		
	c. Pemutahiran data base pengolahan	44,000,000	-	43,900,000	99.77	-	-	100,000		
	- Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan	166,545,000	-	166,470,000	99.95	-	-	75,000		
	a. Pembinaan dan pendampingan kemitraan	18,210,000	-	18,185,000	99.86	-	-	25,000		
	b. Pemberdayaan agribisnis peternakan	3,270,000	-	3,270,000	100.00	-	-	-		
	g. korporasi Lombok Tengah	83,580,000	-	83,580,000	100.00	-	-	-		
	h. korporasi Lombok Timur	61,485,000	-	61,435,000	99.92	-	-	50,000		
	- Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan	5,347,000	-	5,347,000	100.00	-	-	-		
	- Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	205,000,000	2 Unit	203,981,500	99.50	2	100.00	1,018,500		
	- Sarana dan sertifikasi organik produk pangan asal ternak	130,000,000	1 Unit	129,734,500	99.80	1	100.00	265,500		
	- Sarana pasar ternak	75,000,000	1 Unit	74,247,000	99.00	1	100.00	753,000		
	- Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	175,000,000	2 Unit	175,000,000	100.00	2	100.00	-		
	- Prasarana dan sertifikasi organik produk pangan asal ternak	50,000,000	1 Unit	50,000,000	100.00	1	100.00	-		
	- Prasarana pasar ternak	125,000,000	1 Unit	125,000,000	100.00	1	100.00	-		
		380,000,000		378,981,500	99.73					
2	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN	18,068,191,000	-	17,085,136,500	94.56	-	100.00	983,054,500		
a	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1,150,000,000	-	1,147,795,000	99.81	-	100.00	2,205,000		
-	Bantuan Peralatan/Sarana	1,120,000,000	2 Unit	1,118,245,000	99.84	2	100.00	1,755,000		
	Hijauan Pakan Ternak	400,000,000	1 Unit	399,645,000	99.91	1	100.00	355,000		
	Pakan Olahan dan Bahan Pakan	720,000,000	2 Unit	718,600,000	99.81	2	100.00	1,400,000		
-	Penyidikan dan Pengujian Produk	30,000,000	15 Produk	29,950,000	98.50	15	100.00	450,000		
	Mutu dan Keamanan Pakan	30,000,000	15 Produk	29,550,000	98.50	15	100.00	450,000		
	- Pengawasan mutu dan keamanan pakan sapi potong	20,000,000	15 Produk	19,600,000	98.00	15	100.00	400,000		
	- Pengawasan mutu dan keamanan pakan ayam ras pedaging	10,000,000	10 Produk	9,950,000	99.50	10	100.00	50,000		
b	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	387,500,000	-	387,082,500	99.89	-	100.00	417,500		
	- Pelayanan Publik Lainnya	387,500,000	4 Layanan	387,082,500	99.89	4	100.00	417,500		
	Pelayanan Kesehatan Hewan	387,500,000	4 Layanan	387,082,500	99.89	4	100.00	417,500		
	- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies	219,155,000	2,000 Dosis	218,738,800	99.81	2,000	100.00	416,200		
	- Fasilitasi Puskeswan	58,630,000	3 Unit	58,629,100	100.00	3	100.00	900		
	- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan anthrax	109,715,000	10,000 Dosis	109,714,600	100.00	10,000	100.00	400		
c	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	16,105,991,000	124,553	Kelompok Masyarakat	15,133,431,600	93.96	124,553	100.00	972,559,400	
	- Bantuan Kelompok Masyarakat	16,105,991,000	124,553	Kelompok Masyarakat	15,133,431,600	93.96	124,553	100.00	972,559,400	
	Optimalisasi Reproduksi	11,697,281,000	124,540	Kelompok Masyarakat	10,879,380,600	93.01	124,540	100.00	817,900,400	
	- Fasilitasi alat dan bahan IB	1,719,200,000	-	913,417,000	53.13	-	53.00	805,783,000		
	- Pengadaan N2 Cair	1,448,850,000	75,000 Liter	1,448,751,000	99.99	75,000	100.00	99,000		
	- Operasional IB	3,445,650,000	101,855 Akseptor	3,444,700,000	99.97	101,855	100.00	950,000		
	- Operasional Kebuntingan	2,149,920,000	59,664 Ekor	2,148,850,000	99.95	59,664	100.00	1,070,000		
	- Operasional Kehilangan	1,711,796,000	71,543 Ekor	1,711,726,000	100.00	71,543	100.00	70,000		
	- Koordinasi, pendampingan dan pengawalan	1,105,061,000	-	1,095,632,600	99.15	-	100.00	9,428,400		
	- Honor Recorder	116,804,000	170 OB	116,304,000	99.57	170	100.00	500,000		
	- Ternak Ruminasia Perah	356,210,000	1 Kelompok Masyarakat	329,621,000	92.54	1	100.00	26,589,000		
	Sapi Perah	356,210,000	12 Ekor	329,621,000	92.54	12	100.00	26,589,000		
	- Ternak Ruminasia Potong	4,052,500,000	5 Kelompok Masyarakat	3,924,430,000	96.84	5	100.00	128,070,000		
	Sapi Potong	4,052,500,000	256 Ekor	3,924,430,000	96.84	256	100.00	128,070,000		
d	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	424,700,000	-	416,827,400	98.15	-	100.00	7,872,600		
	- Sertifikasi Lembaga	346,657,000	1 Lembaga	338,848,200	97.75	1	100.00	7,808,800		
	Sertifikasi Unit Usaha	346,657,000	1 Lembaga	338,848,200	97.75	1	100.00	7,808,800		
	- Pengendalian persyaratan Teknis Kesmavet dan kesrawan	32,437,000	-	32,398,200	99.88	-	-	38,800		
	- Pelaporan data kesmavet	71,005,000	-	66,505,000	93.66	-	-	4,500,000		
	- Pengendalian pemotongan betina produktif	243,215,000	-	239,945,000	98.66	-	-	3,270,000		
	- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	50,293,000	-	50,229,200	99.87	-	-	63,800		
	Masyarakat yang terdaksa Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	50,293,000	50 Orang	50,229,200	99.87	50	100.00	63,800		
	- Komunikasi, informasi dan edukasi zoonosis	30,000,000	50 Orang	30,000,000	100.00	50	100.00	-		
	- Penerapan kesejahteraan hewan	20,293,000	-	20,229,200	99.69	-	-	63,800		
	- Penyidikan dan Pengujian Produk	27,750,000	50 Produk	27,750,000	100.00	50	100.00	-		
	Mutu dan Keamanan Produk Hewan	27,750,000	50 Produk	27,750,000	100.00	50	100.00	-		
	- Pengawasan keamanan produk hewan	27,750,000	-	27,750,000	100.00	-	-	-		
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	301,573,000	3 Layanan	300,514,200	99.65	3	100.00	1,058,800		
a	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P	301,573,000	3 Layanan	300,514,200	99.65	3	100.00	1,058,800		
	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	256,986,000	1 Layanan	256,214,200	99.70	1	100.00	771,800		
	Layanan perencanaan	120,830,000	-	120,438,200	99.68	-	-	391,800		
	Layanan perbendaharaan Internal	112,161,000	-	112,161,000	100.00	-	-	-		
	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	23,995,000	-	23,615,000	98.42	-	-	380,000		
	- Layanan Data dan Informasi	26,593,000	1 Layanan	26,350,000	99.09	1	100.00	243,000		
	Layanan Data dan Informasi	26,593,000	-	26,350,000	99.09	-	-	243,000		
	- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	17,994,000	1 Layanan	17,950,000	99.76	1	100.00	44,000		
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17,994,000	-	17,950,000	99.76	-	-	44,000		
		-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	19,185,746,000	-	18,198,949,200	94.86	-	100.00	986,796,800		

a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Tahun 2021 untuk kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak teralokasi anggaran sebesar Rp. 815.982.000 dengan realisasi sebesar Rp. 813.298.500 (99,67%), dan realisasi fisik (100%). Terdapat 3 sub kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu :

1. Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan eksport. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yakni :
 - (a) Pembinaan dan pendampingan pembiayaan

Dalam rangka pembinaan dan pendampingan pembiayaan Tahun 2021 dilaksanakan Pertemuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dilaksanakan di kawasan klaster 1000 Desa Sapi di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah peserta sebanyak 30.

- (b) Pembinaan dan Pendampingan Investasi

Kegiatan pembinaan dan pendampingan investasi dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota, dengan melakukan pemetaan potensi-potensi investasi yang dapat dikembangkan.

- (c) Identifikasi Potensi Produk dan Pelaku Usaha Eksport Peternakan

Tabel 8. 3 Identifikasi potensi pengembangan sarang burung wallet di NTB

DAFTAR POTENSI PENGEMBANGAN SARANG BURUNG WALET DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GEDUNG SARANG BURUNG WALET	JUMLAH PRODUKSI KG/TAHUN	KETERANGAN
1	KOTA MATARAM	1	353	Data Karantina
2	LOMBOK BARAT	1	-	
3	LOMBOK TENGAH	76	727	Data Karantina
4	LOMBOK UTARA	17	1,767	Data Karantina
5	LOMBOK TIMUR	-	52	
6	SUMBAWA BARAT	-	-	
7	SUMBAWA	152	85	
8	DOMPU	550	27,092	Data Pemda Dompu
9	BIMA	-	-	
10	KOTA BIMA	78	550	
	JUMLAH	875	30,626	

Hasil identifikasi di kabupaten kota bahwa tidak semua kabupaten kota memiliki data terkait pengembangan sarang burung wallet karena pengelolaan dan budidaya burung wallet dan madu sebelumnya berada dibawah koordinasi kementerian kehutanan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 104/KPTS/HK.140/2/2020 tentang komoditas binaan kementerian pertanian

Tahun 2020 bahwa budidaya Sarang Burung Wallet (SBW) berada dibawah binaan kemenetrian pertanian Direktorat PKH. Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan kabupaten Bima adalah tiga kabupaten yang belum memiliki data terkait budidaya burung wallet. Sehingga hasil identifikasi di seluruh wilayah NTB terdapat 875 gedung investasi SBW di NTB dengan potensi produksi sebesar 30.625,6 kg/tahun.

Sementara itu pengusaha SBW yang telah melakukan registrasi dibalai karantina pada tahun 2021 sebanyak 23 pengusaha yang tersebar di kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kota Mataram dengan Potensi Produksi pengembangan SBW di pulau Lombok sebanyak 4.245 Kg/tahun dan 588 kg/tahun di Pulau Sumbawa. Sementara itu berdasarkan data Balai Karantina jumlah eksport SBW sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 25,2 kg, nilai eksport sebesar Rp. 411.500.000.000,- dengan Negara tujuan Malaysia, hongkong dan amerika. Angka ini realatif kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada di NTB karena sebagian besar peternak SBW memasarkan hasil produksi kepada pengumpul yang akan menjual produknya kepada buyer yang berada di luar NTB seperti Jakarta dan Surabaya sehingga nilai eksportnya berada di provinsi lain.

(d) Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

Pemanfaatan angkutan khusus ternak di NTB selama ini masih untuk kegiatan rutin pemenuhankebutuhan hari raya kurban di wilayah JABODETABEK. Kementerian perhubungan memfasilitasi kebutuhan peternakan dan pengusaha dengan membuat trayek kapal angkutan khusus ternak Cemara Nusantara dengan rute kupang – Bima – Tanjung Priuk – kupang/bima dan kupang – Banjarmasin-bima –Banjarmasin – kupang. Untuk mengakomodir kebutuhan pengusaha ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan melalui anggaran APBN melakukan koordinasi pemanfaatan kapal ternak dengan kabupaten kota sehingga ditetapkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Nomor 188.3/1.703/Disnakkewan/IV/2021 Tanggal: 10 Mei 2021 Tentang :Pengeluaran Sapi Potong Keluar Daerah Menggunakan Kapal Ternak Camara Nusantara Tahun 2021.

Tabel 8. 4 Data realisasi pengiriman ternak menggunakan angkutan khusus ternak Camara Nusantara

No.	Tanggal	Nama Kapal	Perusahan/Peternak	Jumlah Muat (ekor)
1	19 - 4 - 2021	Camara Nusantara 4	CV. Dena Bersaudara CV. Rabiatul Yaunil CV. Putra Mahkota CV. Bina Usaha	650
2	30 - 4 - 2021	Camara Nusantara 2	CV. Karya Mandiri UD. Adi Putra UD. Melati CV. Putra Tunggal CV. Rizal	650
3	12/5/2021	Camara Nusantara 6	CV. Sari Owo CV. Wahana Abadi UD. Putra Mandiri CV. Berkah Fajar Persada CV. Riski Putri	650
4	22 - 5 - 2021	Camara Nusantara 4	CV. Mulia Anugrah UD. Putra Adi Bima CV. Tiga Bersaudara CV. Dungga Nggolo CV. Rade Wura	650
5	23 - 5 - 2021	Camara Nusantara 6	PT. Anita Putri Jaya CV. Putri Khanza CV. Fortuna Jaya UD. Berlian Super CV. Bima Satria Jaya	650
6	2/6/2021	Camara Nusantara 4	CV. Karya Tiga Putri CV. Karya Mandiri CV. Mpori Lembo	650
7	3/6/2021	Camara Nusantara 6	CV. Lailatul Fitri CV. Doro Naga CV. Karya Tiga Putri CV. Mahanatha Jaya CV. FaJlu Rahman Putra CV. Karya Putra Bima	650
8	13 - 6 - 2021	Camara Nusantara 4	CV. Sri Ratu Mandiri CV. Imadudin Uzairi CV. Balumba Wane CV. Kalembo Ade CV. Putri Nia CV. Tiga Sahabat	650
9	14 - 6 - 2021	Camara Nusantara 6	CV. Atom Jaya Poultry CV. Mandiri Abadi CV. Karya Sejahtera UD. Doro Luba	650
10	24 - 6 - 2021	Camara Nusantara 4	CV. Colega Abadi CV. Putra Jaya Sakuru CV. Pasir Putih CV. Rejeki Perdana CV. Maju Makmur	650

Namun pelaksanaan di lapangan tidak seluruhnya sesuai dengan SK yang telah ditetapkan karena adanya kendala seperti tidak tepatnya jadwal kedatangan kapal ke pelabuhan Bima selain itu jadwal docking kapal yang berubah dan cukup lama sehingga ternak dan pengusaha yang telah siap dipelabuhan harus mengeluarkan biaya lagi untuk maintenance ternak selama menunggu kapal pengangkut ternak lain seperti kapal tronton, kargo ataupun kapal kayu.

(e) Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan

Kegiatan Pembinaan /pendampingan pengolahan hasil peternakan berupa pendampingan pada kelompok untuk memperoleh sertifikat organic dan Nomor Kontrol Veteriner, melaksanakan bimbingan teknis pencucian sarang burung wallet. Di Desa Kateng Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 15 Juni 2021, melaksanakan sosialisasi aplikasi sistem informasi UPH Peternakan Indonesia (SIUPIn) Versi 2.0, Pemutahiran Data UPH Peternakan dari 10 Kabupaten Kota Se-NTB, dan Bimtek Aplikasi SIUPIn agar petugas SIUPIn dapat menginput data UPH Melalui Aplikasi SIUPIn, Versi 2.0,

(f) Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan

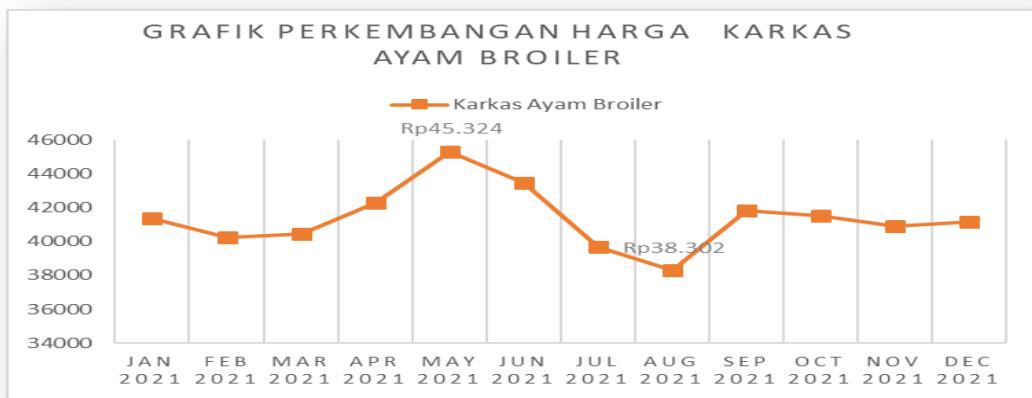
Kegiatan pembinaan/pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan Tahun 2021 dilaksanakan pada 2 kelompok ternak yang sudah bentuk koorporasi yakni di KTT Ridho Ilahi dan Korporasi Mandalika Baren Sampi adapun kegiatannya adalah Pertemuan unit manajemen kawasan korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Bank Pakan KTT Bumbung Wetan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, Pertemuan unit manajemen kawasan korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 50 orang.

(g) Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan

Informasi pasar sangat diperlukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam pergeseran paradigma dari orientasi produksi ke orientasi pasar. Informasi pasar yang akurat dan up to date khususnya yang terkait dengan harga, permintaan, penawaran, ketersediaan dan distribusi produk-produk pertanian sangat diperlukan bagi pelaku pasar, petani maupun penentu kebijakan. Hal ini juga diperoleh untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya gejolak harga yang sering terjadi yang dapat merugikan para petani dan konsumen.

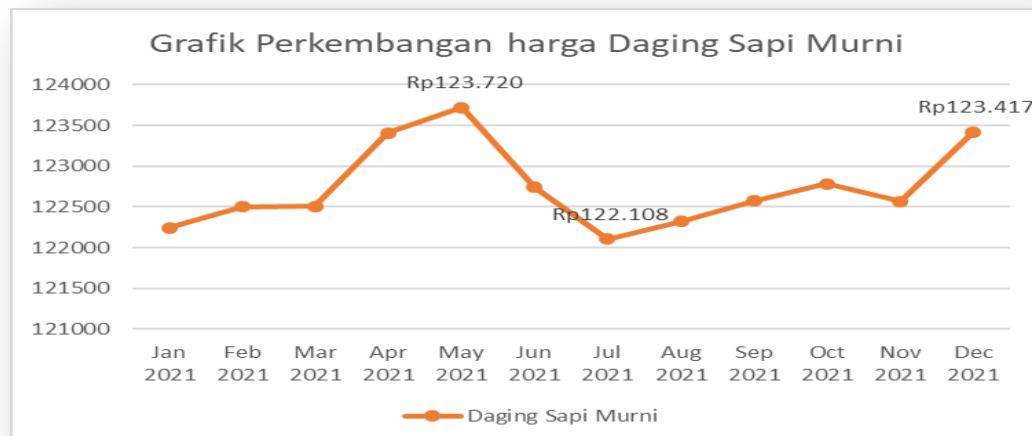
Petugas Pelayanan Informasi Pasar yang ada di Provinsi NTB terdiri dari 9 Orang yaitu 1 orang petugas di Provinsi, 8 orang lainnya berada di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di NTB seperti Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa dan kab. Bima.

Gambar 4 Grafik Perkembangan Harga Karkas Ayam Broiler



Perkembangan harga daging ayam mulai merangkak dari bulan April sampai dengan Mei. Kenaikan harga ini karena adanya peningkatan permintaan jelang Ramadhan dan Idul Fitri, selain HKBN kenaikan harga daging ayam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : Harga pakan yang menyebabkan biaya produksi tinggi, tingginya harga input produksi seperti DOC broiler yang tinggi jd. Harga terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu Rp. 38.302. Penurunan harga ini terjadi karena oversupply, dan permintaan menurun karena kondisi pariwisata masih sepi sehingga hotel dan rumah makan belum banyak permintaan akan daging ayam. Selain itu, penurunan harga daging ayam ini disinyalir karena banyaknya beredar daging beku di masyarakat yang bersal dari Pulau Jawa.

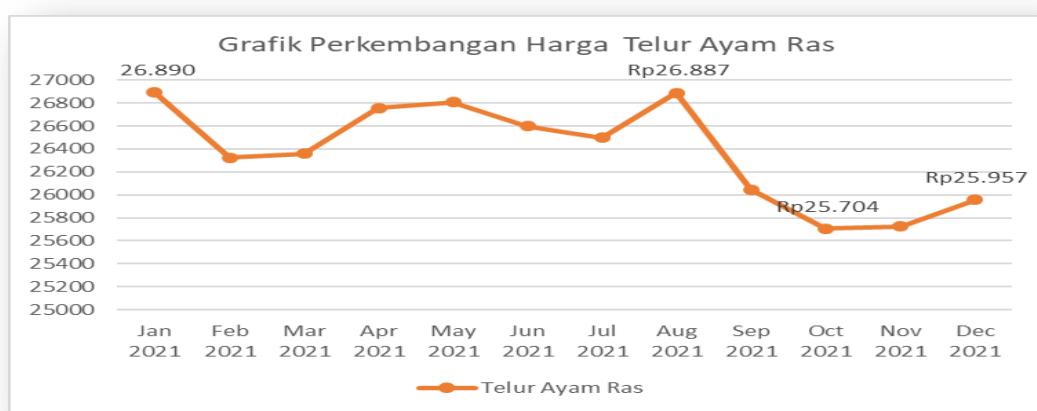
Gambar 5 Grafik Perkembangan Harga Daging Sapi Murni



Perkembangan harga daging sapi berbanding lurus dengan kenaikan harga daging ayam karena adanya peningkatan permintaan jelang Ramadhan dan Idul Fitri,

Kenaikan harga daging sapi sempat mengalami penurunan dibulan Juli karena menjelang hari raya idul adha. Pada bulan ini, permintaan akan hewan qurban tinggi sedangkan permintaan daging menurun. Selain itu pariwisata juga masih lesuh akibat dampak covid 19 dan mulai mengalami kenaikan lagi dibulan November sampai menjelang natal dan tahun baru. Permintaan dibulan November mulai naik karena adanya even Internasional sehingga permintaan melonjak karena tingginya kunjungan wisatawan menjelang even internasional di Sirkuit Mandalika.

Gambar 6 Grafik Perkembangan Harga Telur Ayam Ras



Perkembangan harga telur diawal tahun 2021 mengalami kenaikan begitupula diawal tahun 2022. Kenaikan harga ini dipengaruhi tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sedangkan pada bulan Oktober harga telur di NTB anjlok disebabkan rendahnya permintaan masyarakat dan oversupply. Secara keseluruhan perubahan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : Tingginya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Over Supply, tingginya harga pakan, Bantuan social dan Daya beli masyarakat menurun

2. Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Tahun 2021 untuk kegiatan Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan teralokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 378.981.500 (99,73%), dan realisasi fisik (100%). Terdapat 2 kegiatan yakni sertifikasi organik produk pangan asal ternak dan pasar ternak.

Pertama kegiatan sertifikasi organik produk pangan asal ternak meliputi bantuan Peralatan pengolahan hasil Peternakan dan fasilitasi prasarana pupuk organic kepada KTT. SPR Ridho Ilahi

Kedua kegiatan Pasar Ternak adalah salah satu sarana yang digunakan dalam pemasaran hasil peternakan, khususnya ternak hidup. Pasar Ternak terletak di suatu lokasi dengan luasan dan batas tertentu yang telah ditetapkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pemasaran (transaksi, jual-beli) ternak;

Tabel 8. 5 Data Pasar Hewan di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Nama Pasar Hewan	Alamat
1.	Pasar Hewan Selagalas	Jl. Peternakan Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram
2.	Pasar Hewan Narmada Merce	Batu Kumbung Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
3.	Pasar Hewan Barabali	Desa Barabali Batu Kliang Kab. Lombok Tengah
4.	Pasar Hewan Praya	Praya, Kab. Lombok Tengah
5.	Pasar Hewan Tanjung	Sokong, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara
6.	Pasar Hewan Masbagek	Masbagek Selatan Kec. Masbagek Kab. Lombok Timur
7.	Pasar Hewan Poto Tano	Poto Tano, Kec. Sateluk Kab. Sumbawa Barat
8.	Pasar Hewan Bangkong	Karang Dima, Kec. Badas Kab. Sumbawa
9.	Pasar Hewan Manggalewa	Doromelo Kec. Manggalewa Kab. Dompu
10.	Pasar Hewan Woja	Kelurahan Simpasari Kec. Woja Kab. Dompu

Kegiatan fasilitasi prasarana tahun 2021 dilakukan di Pasar Ternak Masbagik kabupaten Lombok Timur. Kegiatan berupa pembangunan dua unit pos jaga yang akan digunakan sebagai tempat ticketing dan pintu masuk bagi peternak, penambahan gang way ternak serta revitalisasi gedung kantor pasar masbagik secara fisik telah terealisasi 100%. Sementara itu Fasilitasi Sarana Pasar ternak di pasar ternak Masbagik berupa pengadaan peralatan pasar ternak seperti Running text, CCTV, computer dan wifi sedangkan Operasional dan Administrasi kegiatan berupa HP. Android dan aplikasi Penginputan data pelaku transaksi jual beli ternak juga telah terealisasi 100%.

b. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Manajemen pakan yang baik akan memberi peluang untuk mendapatkan hasil yang baik, selain itu pakan merupakan salah satu faktor strategis yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak dan secara langsung berkorelasi dengan *performance* ternak, disamping itu biaya untuk pakan menempati porsi terbesar dari total biaya produksi yaitu 70 - 80%, terhadap keseluruhan biaya produksi. Memproduksi pakan bukan hanya dilihat dari segi kualitas yang baik tetapi juga dari segi ekonomisnya, murah dan mudah terjangkau oleh konsumen, karena dengan kecenderungan biaya pakan yang semakin meningkat, sudah dapat dipastikan usaha budidaya ternak juga akan terkendala

bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha. Pemerintah telah mengupayakan beberapa program terobosan yang mengarah kepada ketahanan pakan., agar kedepan ketergantungan terhadap bahan impor dapat semakin berkurang dan pada akhirnya harapan untuk mandiri dengan menggunakan bahan pakan lokal dapat tercapai.

Tahun 2021 Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak teralokasi pagu anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.147.795.000,- atau (99,81 %), untuk realisasi fisik kegiatan yaitu 100 %. Adapun rincian kegiatannya adalah Bantuan sarana berupa Pembagunan Bank Pakan di 2 lokasi total pagu Rp. 720.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 718.600.000,- (99,81%) atau realisasi fisik 100 % yang dialokasikan di 2 kelompok yaitu : (1) KTT Sepakat desa tangga kecamatan Monta Kabupaten Bima dan (2) KTT Hisdi Desa Rite Kelurahan Raba Kota Bima. Untuk Kegiatan Pengembangan Pakan Hijauan Pakan Ternak Sapi Potong, di 6 lokasi di kab. Lobar, Loteng, KLU, KSB, Dompu dan Bima, total pagu sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 399.645.000,- (99,91) dan realisasi fisik 100 %.

Tujuan kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Sapi Potong Tahun 2021 adalah : 1). Meningkatkan produksi hijauan pakan berkualitas di kebun HPT dan padang pengembalaan, 2).Meningkatkan kapasitas keterampilan dan pengetahuan peternak tentang budidaya dan pemanfaatan hijauan pakan berkualitas; dan 3). Meningkatkan akses ternak dan keterjangkauan peternak terhadap hijauan pakan berkualitas

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1). Tumbuhnya kelompok – kelompok yang memelihara hijauan pakan ternak berupa rumput dan leguminose sepanjang tahun dan berkelanjutan, 2) Tersedianya hijauan pakan ternak berkualitas di wilayah usaha kelompok, yang tersedia sepanjang tahun, 3). Terlaksananya kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Sapi Potong dengan output kegiatan seluas 10 Ha.

Sasaran kegiatan di 6 (lokasi), yaitu : 1). KTT. Batu Bangke Mandiri – Dsn Batu Bangke Ds. Cendi Manik Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, 2). KTT. Renseng – Loteng, Ds. Batu Jangkih Kec. Praya Barat Daya Lombok Tengah, 3). KTT. Titiq Sama Guna – KLU, Dsn. Gubuk Baru Ds. Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, 4). KTT. Mako Aji – KSB Ds. Seteluk Atas Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, 5). Padang Pengembalaan Doroncanga Ds. Doroncanga Kec. Pekat Kab. Dompu, 6). Padang Pengembalaan Oi Tui Desa Oi Tui Kec. Wera Kab. Bima.

Sedangkan Kegiatan Mutu dan Keamanan pakan teralokasi pagu sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.550.000,- (98,50%) dan realisasi fisik

100%, Kegiatan mutu dan keamanan pakan adalah kegiatan pengawasan mutu dan keamanan sapi potong dan ayam ras pedaging. Kegiatan pengawasan mutu pakan juga dilakukan di KTT. Bumbang Wetan – Pujut Lombok Tengah, yang merupakan Bank Pakan tahun 2020 dengan produk berupa silase dan di KTT. Bareng Mele II dan SPR Ridho Illahi di Kabupaten Lombok Timur, dengan produksi pakan berupa konsentrat dengan bahan baku dari limbah pertanian. Produksi dari ke 3 kelompok tani ternak tersebut lebih banyak untuk di gunakan sendiri dan ada yang di perjualbelikan.

Tabel 8. 6 Rekapan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan – Bekasi Tahun 2021:

NO	JENIS SAMPLE	NO. LHP	PARAMETER (%)						
			AIR	ABU	PK	LK	SK	Ca	Phospor
<i>Sapi Potong (SP)</i>									
1	Silase (Jagung, Dedak, Molases) - KTT. Bumbang Wetan Loteng	LHP 0073.230/03/2021	50,95	13,09	7,06	1,18	29,56	0,30	0,34
2	Silase (Rumput, Dedak, Molases) - KTT. Bumbang Wetan-Loteng	LHP 0073.231/03/2021	58,1	12,30	6,06	2,26	28,12	0,25	0,26
3	Konsentrat (SP Indukan)-KTT Tunas Karya II Loteng	LHP 0073.232/03/2021	10,29	11,54	11,72	1,88	23,59	1,00	0,48
4	Konsentrat (Sapi Penggemukan)- KTT Tunas Karya II Loteng	LHP 0073.233/03/2021	11,50	15,83	10,85	1,12	23,15	2,33	0,51
5	Hay Lamtoro-SPR Ridho Illahi Lotim	LHP 0106.297/04/2021	20,76	8,80	26,75	2,38	10,27	1,63	0,22
6	Komplit Feed - SPR Ridho Illahi Lotim	LHP 0106.298/04/2021	7,60	13,93	9,81	3,56	28,19	0,34	0,44
7	Konsentrat - SPR Ridho Illahi Lotim	LHP 0106.299/04/2021	12,56	4,37	20,55	8,29	3,20	0,16	0,53
8	Kulit Kacang - KTT Bareng Mele II - Lotim	LHP 0107.300/04/2021	13,09	6,35	7,34	0,18	32,61	0,29	0,15
9	Daun Lamtoro - KTT Bareng Mele II –Lotim	LHP 0107.301/04/2021	17,47	11,14	21,97	0,62	31,49	1,56	0,27
10	Konsentrat- KTT Bareng Mele II Lotim	LHP 0107.302/04/2021	18,25	10,00	10,38	3,57	24,07	0,51	0,69
11	Dedak - KTT Bareng Mele II Lotim	LHP 0107.303/04/2021	13,23	11,11	8,75	5,56	15,26	0,03	1,30
12	Konsentrat -BIB Banyumulek-Lobar	LHP 0107.304/04/2021	11,15	8,07	16,99	3,83	5,83	1,16	0,72
13	Hijauan (R.Odot, R.Gajah)- BIB Banyumulek-Lobar	LHP 0107.305/04/2021	71,10	14,93	7,28	0,91	34,72	0,36	0,14
14	Hijauan (R.Lap)- KTT. Kerangkeng Bangkit Lobar	LHP 0107.306/04/2021	75,78	17,54	17,01	1,49	31,08	0,80	0,57
15	Hijauan (R.Lap, Lamtoro)- KTT Kerangkeng Bangkit Lobar	LHP 0107.307/04/2021	80,25	15,00	21,40	1,80	36,08	1,55	0,40

NO	JENIS SAMPLE	NO. LHP	PARAMETER (%)						
			AIR	ABU	PK	LK	SK	Ca	Phospor
<i>Ayam Pedaging (AP)</i>									
1	Pakan Starter Ayam Pedaging - KTT. Genem Ngadas -KLU	LHP 0073.234/03/2021	11,16	5,39	21,17	4,81	2,17	0,74	0,56
2	Pakan Komplit Ayam Pedaging - Toko Rizky Farm KLU	LHP 0073.235/03/2021	10,36	5,80	19,74	6,75	2,55	0,78	0,59
3	Pakan Ras Ayam Pedaging starter - Toko Rizky Farm KLU	LHP 0073.236/03/2021	10,777	7,44	18,15	3,70	2,80	1,60	0,54
4	Bloiler 1 - Crumble - Toko UD Barokah Alam Loteng	LHP 0105.266/03/2021	11,34	5,74	22,64	4,90	2,43	0,89	0,56
5	Bloiler 1 - Super - Toko CV Bima Komoditi Loteng	LHP 0105.267/03/2021	10,79	6,11	21,91	5,47	2,57	0,61	0,64
6	Pakan Anak Ayam -Toko CV. Bima Komoditi Loteng	LHP 0105.268/03/2021	11,64	5,30	20,56	3,12	3,15	0,75	0,56
7	Pakan Broiler Starter- Toko NKS Kotam	LHP 0105.269/03/2021	10,92	7,64	21,63	5,53	4,12	0,86	0,68
8	Konsentrat Layer Super- Toko NKS Kotam	LHP 0105.270/03/2021	9,28	33,25	37,03	3,25	3,39	11,41	0,86
9	Pakan Bloiler Starter - Toko NKS Kotam	LHP 0105.271/03/2021	11,59	6,80	20,89	4,30	3,01	0,66	0,62
10	Pakan Bloiler Starter- Aq. Sahir-Lotim	LHP 0106.296/04/2021	11,63	5,55	21,06	5,34	2,79	0,79	0,58

Dari hasil uji laboratorium diatas (angka yang bergaris bawah tidak sesuai SNI), ada 2 sampel pakan untuk ayam pedaging pabrikan yaitu sampel pakan yang diambil di Toko CV. Bima Komoditi, yakni jenis Pakan ayam ras pedaging broiler bag.2 masa awal stater (BR1-Super) Umur 8 – 21 hari produksi PT. Panca Patriot Prima dengan Nomor Pendaftaran Pakan PD. 2.11907337 dan sampel Pakan anak ayam broiler umur 1 – 21 hari (BR 1 – S) produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia dengan Nomor Pendaftaran Pakan PD.2.11710562, hal ini perlu diwaspadai adanya pemalsuan dalam pakan unggas ataupun cara penyimpanan pakan yang tidak benar. Oleh karena itu evaluasi pakan menjadi sangat penting dilakukan untuk mendeteksi kualitas dan keamanan pakan.

Untuk hasil uji laboratorium sampel pakan hasil olahan (lokal) khususnya pakan sapi potong produk KTT. Bumbang Wetan – Pujut Loteng berupa silase (PK : 7.08 %) sudah memenuhi Persyaratan Tekhnis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan, yaitu untuk protein kasar 7,0 % sementara konsentrat pakan sapi potong produk KTT. Bareng Mele II dengan bahan baku lokal, masih dibawah standar umum kandungan nutrisi dalam pakan sapi (Protein Kasar 12 – 13 %), sementara hasil pengujian sampel konsentrat sapi untuk protein kasar berkisar 10.38%, ini perlu diwaspadai juga barangkali bahan baku untuk

pembuatan konsentrat sudah terlalu lama di simpan digudang dan cara penyimpanannya yang membuat nilai gizi dari bahan baku tersebut turun.

Tabel 8. 7 Hasil Uji Laboratorium terhadap pakan konsentrat sapi potong pabrikan yang diambil di Kelompok Tahun 2021.

No	Jenis Pakan	Parameter (%)						
		AIR	ABU	PK	LK	SK	Ca	P
1	Konsentrat Sapi Potong Penggemukan	11,50	15,83	10,85	1,12	23,15	2,33	0,51
	SNI Konsentrat sapi potong penggemukan (SNI 3148.2:2017)	Max 14	Max 12	Min 13	Max 7	-	0.60-1.20	0.40-0.80
2	Konsentrat Sapi Potong Indukan	10,29	11,54	11,72	1,88	23,59	1,00	0,48
	SNI Konsentrat sapi potong indukan (SNI 3148.2:2017)	Max 14	Max 12	Min 12	Max 6	-	0.80-1.20	0.60-0.80

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian sampel pakan konsentrat untuk sapi penggemukan produk Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah Malang – Jawa Timur, dengan NPP PD.7.199909416 (PK 10.85%) dan konsentrat sapi indukan produk PMT Nutriefeed – Klaten NPP PD.7.21803003 (PK 11.72%). di peroleh hasil rata rata kandungan protein kasar masih dibawah Standar Nasional Indonesia, dimana pakan konsentrat yang beredar tidak terjadi pemalsuan /penyimpangan dan layak untuk dikonsumsi, namun kwalitasnya yang sudah menurun, ini disebabkan karena pakan konsentrat yang diambil di KTT. Tunas Karya II Pujut Lombok Tengah yang merupakan salah satu kelompok program 1000 Desa Sapi di Kawasan Lombok Tengah, dimana pakan tersebut sudah lama dan cara penyimpanannya yang kurang tepat yang menyebabkan kwalitas dari pakan konsentrat tersebut menurun.

c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu, kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2021 teralokasi anggaran sebesar Rp. 387.500.000,- realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 387.085.500,- atau sebesar 99,89 Persen. Sementara realisasi fisik kegiatan yaitu sebesar 100 persen. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu

1. Pencegahan dan pengamanan penyakit rabies Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies merupakan kegiatan penting dalam hal mengendalikan wabah rabies di NTB. Focus kegiatan rabies yang bersumber dari dana APBN di laksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota di NTB dengan target operasional vaksinasi yaitu 2000 dosis dengan realisasi 100% adapun lokasi target vaksinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. 8 Target dan Realisasi Kegiatan Vaksinasi Rabies di NTB Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Kota Mataram	300	300	
2.	Lombok Barat	100	100	
3.	Lombok Tengah	100	100	
4.	Sumbawa Barat	200	200	
5.	Sumbawa	300	300	
6.	Kota Bima	1000	1000	
	Jumlah	2.000	2.000	

Selain vaksinasi Rabies terdapat beberapa kegiatan pengadaan seperti pengadaan vaksin rabies yang merupakan produk dari Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dosis, pengadaan leaflet/brosur guna kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta kegiatan kontrol populasi HPR dengan anggaran Rp.19.073.000,-/realisasi 100%, pelaksanaan kontrol populasi tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai target yaitu 20 ekor (Kab. Sumbawa 6 ekor, Lombok Barat 4 ekor dan Kota Mataram 10 ekor).

2. Pencegahan dan pengamanan penyakit Anthrax.

Penyakit Anthrax masih merupakan masalah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa sejak beberapa tahun ini meskipun telah dilakukan upaya pengendalian seperti vaksinasi, dan hampir setiap tahun menyebabkan kematian pada ternak, selain itu juga dihawatirkan menular kepada manusia . Sementara di

Pulau Lombok sejak 34 tahun terakhir tidak dijumpai kasus penyakit Anthrax dimana kasus anthrax terakhir terjadi pada tahun 1987 di Dusun Tanak Kaken Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2021 ditemukan 4 (empat) kasus Anthrax yang terjadi di Kabupaten Sumbawa 3 kasus dan Kabupaten Dompu 1 kasus, memperhatikan perkembangan kasus terakhir penyakit Anthrax tersebut maka Tindak Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anthrax di Pulau Sumbawa harus lebih ditingkatkan, diantaranya : melaksanakan vaksinasi Hasil realisasi oprasional vaksinasi anthrax tahun 2021 adalah sebanyak 1.500 dosis (100 %) dari yang ditargetkan, kegiatan vaksinasi Anthrax hanya dilaksanakan di Kota Bima, dan kegiatan Surveilans Antrax, Survaelance merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau perilaku penyakit dilapangan. Surveilans yang diagendakan secara aktif merupakan strategi yang penting dan menjadi alat untuk memantau arah perkembangan penyakit dilapangan dengan berbagai interaksinya yang begitu kompleks. Surveilans dilakukan untuk mengetahui tinter antibodi sebelum dilakukan vaksinasi dan setelah dilakukan vaksinasi serta untuk mengetahui vaksin yang digunakan telah mampu menimbulkan zat kebal protektif sehingga besarnya tingkat kekebalan kelompok (herd immunity) bisa diperkirakan. Pada tahun 2021 akibat adanya refocusing anggaran kegiatan Surveilans AT hanya dilaksanakan Pengambilan sampel di Kabupaten Sumbawa 100 sampel dan Kota Bima 150 sampel dan Pemeriksaan sampel oleh Laboratorium Tipe B Banyumulek sebanyak 250 sampel dengan realisasi 100%

3. Fasilitasi Puskeswan di 3 lokasi berupa Pemberian Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan pada petugas puskeswan merupakan salah satu langkah mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan hewan pada wilayah kerja puskeswan. Adapun realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 8. 9 Target dan Realisasi Pemberian Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan

No.	Uraian Pekerjaan	Target	Realisasi	(%)
1.	Operasional pelayanan keswan (Puskeswan Pujut)	150 ekor	150 ekor	100
2.	Operasional pelayanan keswan (Puskeswan Pringgasela)	150 ekor	150 ekor	100
3.	Operasional pelayanan keswan (Puskeswan Labangka)	150 ekor	150 ekor	100

Selain itu juga difasilitasi biaya pengadaan obat-obatan untuk mendukung pelayanan di Puskeswan terutama puskeswan dilokasi program prioritas kementerian pertanian yaitu desa 1000 sapi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan dukungan terhadap pengembangan kawasan food estate labangka.

d. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2021 teralokasi anggaran sebesar Rp. 16.105.991.000,- realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.133.431.600,- atau sebesar 93,96 Persen. Sementara realisasi fisik kegiatan yaitu sebesar 100 persen. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu : Optimalisasi Reproduksi, Ternak Ruminasia Perah dan ternak ruminasia potong.

1. Sub Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Sikomandan yang telah berjalan sejak tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak secara optimal melalui teknologi inseminasi buatan.

Pelaksanaan kegiatan Sikomandan Tahun 2021 ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi NTB. Untuk mencapai target, kegiatan Sikomandan dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan N2 Cair sejumlah 75.000 liter, pengadaan container depo dan container lapangan, peralatan dan kelengkapan untuk pelayanan Inseminasi Buatan seperti plastic sheet dan sarung tangan 5 jari. Selain itu terdapat pengadaan untuk menunjang kegiatan di Balai Inseminasi Buatan NTB sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pelayanan dari Balai Inseminasi Buatan NTB sebagai produsen Semen Beku Daerah yang menghasilkan semen beku yang digunakan untuk kegiatan Sikomandan.

Semen beku yang digunakan dalam kegiatan Sikomandan ini adalah semen beku yang telah bersertifikat SNI. Realisasi pembayaran BOP (BOP Reguler dan PEN) untuk Pelayanan IB adalah sebanyak 114.727 ekor atau Rp. 3.441.810.000 (99,89%), Pelayanan PKb sebanyak 71.398 ekor atau Rp. 2.141.940.000 (99,63%) dan Laporan Kelahiran sebanyak 74.714 ekor atau Rp. 1.494.280.000 (89,43%). Kelahiran yang dihasilkan dari kegiatan Sikomandan ini berkontribusi sebanyak 5,81% dari total populasi sapi 1.285.746 ekor pada tahun 2020. Realisasi fisik dan keuangan dari

pembayaran BOP pelaksanaan kegiatan Sikomandan di masing-masing kabupaten/kota terdapat pada Lampiran.

Kegiatan Sikomadan juga didukung oleh kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan di wilayah sumber bibit (wilsumbit) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, yang dipusatkan di 7 wilayah kecamatan, yaitu Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Pringgarata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan performans sapi bali dengan cara meningkatkan system recording/ pencatatan pada kelompok-kelompok ternak sapi Bali, penerapan Inseminasi Buatan dengan menggunakan bibit sapi Bali unggul sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bibit sapi Bali yang dihasilkan.

2. Sub kegiatan pengadaan ternak perah, tahun 2021 ini teralokasi anggaran untuk pengadaan ternak perah sebanyak 12 ekor yang didistribusikan ke kelompok tani ternak Suara Alam Dasan Tengak Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.
3. Sub kegiatan ternak ruminasia potong adalah pengadaan sapi potong untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian yaitu 1000 Desa Sapi, Tahun 2021 ini dialokasi anggaran untuk pengadaan sapi sebanyak 256 ekor yang diidstribusikan pada 5 kelompok yang bergabung dalam Korporasi Mandalika Bareng Sampi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Data korporasi 5 Desa 1000 Desa Sapi di Kecamatan Pujut Lombok Tengah Tahun 2021 (Korporasi Mandalika Baren Sampi)

No .	Desa/Nama Kep.	Jumlah Anggota	Jlh Sapi		Ket
			Penggemukan	Indukan	
1.	Kelompok Mekar Jati, Desa Mertak	53	100	100	
2.	Kelompok Mele Maju, Desa Sukada	75	100	100	
3.	Kelompok Tandur Desi, Desa Pengengat	50	100	100	
4.	Kelompok Tuas Karya II, Desa Teruwai	73	100	99	Mati
5.	Kelompok Dui Urip, Desa Bangket Parak	52	100	100	
Jumlah		303	500	499	

e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dewasa ini memegang peranan penting dalam menyediakan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai pintu keberhasilan pembangunan peternakan khususnya sektor hilir, bidang kesmavet selain dapat menyediakan protein hewani (daging, telur dan susu) serta produk hewan non pangan dan juga mampu mengamankan konsumen dari penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari produk asal hewan ke manusia.

Tahun 2021 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Hewan Veteriner teralokasi anggaran sebesar Rp. 424.700.000,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 416.827.400 atau (98,15%). Adapun beberapa sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi Unit Usaha

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan merupakan salah satu jaminan untuk penyediaan produk pangan asala hewan yang ASUH. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilaia pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan.

Tujuan sertifikasi NKV adalah : (a) Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asala hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah; (b) Mendukung terwujudnya ketenteraman batin masyarakat; (c) Meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan Indonesia di pasar Internasional.

Sasaran pembinaan NKV pada unit usaha pangan asal hewan adalah : Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan Rumah Pemotongan Babi (RPB), Usaha budidaya unggas petelur, Usaha Pemasukan, pengeluaran, pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (Cold Storage) dan Toko/kios daging (Meat shop), pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (Milk cooling centre) dan gudang pendingin susu dan Usaha distribusi produk pangan asal hewan.

Tahun 2021 kegiatan sertifikasi lembaga tersedia pagu sebesar Rp.346.657.000 dengan realisasi sebesar Rp. 338.848.200 atau (97,75%). Adapun nama unit usaha yang telah ber NKV tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 8. 10 Unit Usaha yang telah memiliki NKV Tahun 2021

No.	Nama Unit Usaha	Kab/Kota	Nomor NKV	Tanggal Terbit
1	CV. Ading Walet Al. Buntaran	Lombok Tengah	UCSBW 520205-001	22 april 2021
2	PT. Mitra Nasional Kualitas	Lombok Barat	CS-520114-003	28 september 2021
3	PT. Samawa Gemilang Perkasa	Sumbawa	BUP-520410-001	11 november 2021
4	CV. Agung Raya Lestari	Sumbawa	CS-520422-002	17 november 2021
5	CV.88 Aurora	Lombok Tengah	CS-520202-002	17 november 2021

2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Tujuan kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan masyarakat veteriner adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pentingnya mengkomsumsi produk hewan yang ASUH, Pencegah penularan zoonosis dari hewan ke manusia, serta penerapan prinsip kesejahteraan hewan.

Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Kesmaveat khususnya tentang penyediaan bahan pangan asal hewan yang ASUH dilaksanakan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Jumlah peserta sebanyak 50 orang, dengan nilai pagu sebesar Rp. 50.293.000. adapun realisasi sebesar Rp. 50.229.200,- (99,87%). Peserta dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya dan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut didapatkan informasi : (1) lalu lintas ternak potong dari Kabupaten Sumbawa ke Pulau Lombok masih ditemukan ada permasalahan diantaranya, dugaan terjadinya penukaran ternak yang sudah diseleksi di holding groun di Kabupaten Sumbawa maupun di Balai karantina Pertanian Badas, dengan ternak yang dipotong yang tidak memenuhi berat minimal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeluaran dan Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging di luar Kabupaten Sumbawa direncanakan akan dilakukan dengan pengiriman daging beku, sehingga pemotongan ternak harus dilakukan di RPH Bangkong yang sudah bersertifikat NKV dan memiliki fasilitas rantai dingin; (3) Keberadaan kios daging yang berada di RPH bangkong Kabupaten Sumbawa belum berfungsi, penjualan

daging masih dilakukan di lapak yang tidak memenuhi standar higienis disebabkan pedagang keengganan pedagang dan kesaadaran pembeli yang masih kurang; (4) Bahan baku ternak potong pada masa mendatang diharapkan memanfaatkan ternak jantan cross breed (persilangan) yang akan dikembangkan dari program inseminasi buatan dengan semen beku eksotis dan keturunan sapi idukan impor yang akan didatangkan; (5) Perlunya ditegakkan peraturan tata niaga pengiriman ternak dengan mengevaluasi titik kritis yang ada, dengan prinsip teknis kerengkatan ternak potong dilaksanakan setelah proses administrasi selesai sepenuhnya yaitu kealurnya rekomendasi teknis pengiriman ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (6) Perlu dilakukan pengawasan terpadu terhadap lalu lintas ternak potong maupun bahan pangan asal hewan yang melibatkan Satgas Pangan dan Polisi Pamong Praja, sebagai bentuk penegakan Peraturan Hukum Daerah; (7) Perlu kerjasama lintas sektoral yang maelibatkan BUMN (Bulog) maupun BUMD (PT.GNE) dengan didukung kalangan perbankan dalam rangka pendistribusian daging sapi dari Sumbawa ke Lombok, disektor hilir produksi. Sedangkan untuk budidaya ternak potong diharapkan memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Pemerintah oleh korporasi kelompok ternak yang berbasis kawasan.

3. Penyidikan dan Pengujian Produk

Penyediaan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesmavet dan kesrawan mulai dari tempat budidaya (Peternakan ayam petelur) Rumah Potong Hewan (Ruminansia, Unggas dan Babi) , gudang penyimpanan tempat produksi sampai tempat penjualan di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat/ pelaku usaha.

Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan diproduksi di unit usaha asal hewan yang menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan serta dibuktikan dengan sertifikat NKV.dalam menjamin ketenteraman batin masyarakat yang mengkonsumsi produk hewan ASUH maka pelaksanaan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah.

Tahun 2021 kegiatan ini teralokasi anggaran sebesar Rp.27.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.750.000,- atau (100%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 100% atau sebanyak 50 produk yang diambil sampel dan kemudian diuji. Terdiri dari sampel

daging sapi sebanyak 40 sampel, daging ayam sebanyak 40 sampel dan telur sebanyak 40 sampel, kemudian diuji sampel di laboratorium berupa uji TPC (daging sapi, ayam, daging olahan dan telur olahan), pengujian E.Coli untuk daging ayam, sapi dan telur, pengujian cilifrom (daging ayam, sapi dan telur) dan pengujian residu antiobik (daging ayam, sapi dan telur).

f. Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Layanan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021, meliputi layanan perencanaan, layanan perbendaharaan internal, layanan pengelolaan barang milik Negara, layanan data dan informasi dan layanan pemantauan dan evaluasi.

Layanan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021, teralokasi anggaran sebesar Rp. 301.573.000,- dengan realisasi sebesar 300.514.200,- (99,65%), untuk target output sebanyak 3 layanan dan realisasi fisik 100%.

8.4. Permasalahan Dan Kendala

Dalam pelaksanakan program/kegiatan tugas pembantuan tahun 2021 di Satuan Kerja (06) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pelaksana diantaranya:

- a. Adanya refocusing anggaran sampi 7 kali sehingga proses revisi DIPA berdampak terhadap penundaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan karena menunggu penetapan pejabat pengelolah proyek, dan menunggu juklak/juknis dari kementerian.
- c. Masih adanya petugas yang perlu ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses dan menerapkan program iSIKHNAS untuk pelaporan kejadian penyakit di lapangan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Puskeswan khususnya tenaga Medis Veteriner (Dokter Hewan) masih kurang sehingga masih ada puskeswan yang tidak memiliki dokter hewan hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan tidak optimal.
- e. Masih belum maksimal penerapan teknologi IB, karena masih kurangnya tenaga inseminator di lapangan serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan IB dilapangan.

- f. Masih rendahnya dukungan anggaran pendataan data sektoral peternakan dan kesehatan hewan.

8.5. Sasaran Dan Tindak Lanjut

- a. Pelaksanaan program/kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kas yang telah dibuat, sehingga realisasi kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun.
- b. Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melalui Penetapan Pejabat Perbendaharaan selambat-lambatnya awal tahun anggaran, Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan di awal tahun anggaran, Percepatan penyelesaian dokumen pendukung , Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan serta Melaksanakan pembayaran atas pekerjaan secara tepat waktu
- c. Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dengan segera melakukan penetapan pejabat/panitia pengadaan/unit pelayanan pengadaan setelah DIPA disahkan, Melakukan identifikasi kegiatan yang memerlukan proses PBJ, Memastikan PBJ yang sifatnya sekaligus dan nilainya dibawah Rp. 200 juta diselesaikan Triwulan I, serta mengupayakan proses PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran
- d. Dukungan Dana Pengendalian dan pemberantasan Rabies, tidak saja berasal dari APBN tapi juga dialokasikan melalui APBD Provinsi dan APBD kabupaten/Kota.
- e. Dalam meningkatkan SDM petugas diperlukan pelatihan/ bimbingan teknis.
- f. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendukung Inseminasi Buatan dilapangan
- g. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung penerapan aplikasi i SIKNAS dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Tersedianya dukungan pemberian penyediaan data sektoral peternakan dan kesehatan hewan.
- i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengawasan internal, melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan secara aktif dan meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal

BAB IX

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi pencapaian Program/Kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Secara umum capaian Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 yang berasal dari sumber dana APBD, berhasil dilaksanakan walaupun realisasi anggaran masih dibawah target yaitu 82,57% dari yang ditargetkan sebesar 95%, sementara realisasi fisik berada di atas 95% dari target yang telah di tetapkan. Capaian nilai realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 82,57% (Rp 60.538.174.933 dari pagu sebesar Rp 73.316.131.660) belum dapat tercapai dikarenakan ketersedian dana kas daerah yang minim, sehingga masih tertundanya pembayarannya di tahun 2022. Sementara untuk capaian kinerja berdasarkan target dan capaian Sasaran Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : (1). Peningkatan Ketersedian Produksi Peternakan dengan target ketersedian produksi daging sebesar 3 % dapat dicapai 6,98 persen atau capaian kinerjanya diatas 100 persen dan Ketersedian produksi telur dari target sebesar 6% dapat direalisasikan sebesar 35% atau dapat tercapai lebih dari 100%; (2) Nilai Tukar Petani Peternakan tahun 2021 di target 110 persen dapat direalisasikan sebesar 108,64 persen atau capaian kinerjanya sebesar 98 %.

Untuk capaian Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 yang berasal dari sumber dana tugas pembantuan (APBN), berhasil dilaksanakan dengan realisasi anggaran yaitu 94,86% (Rp 18.198.949.200 dari pagu sebesar Rp 19.185.749.000) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Demikian penyajian Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan bermanfaat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data-data